

Usia 17 Tahun Otomatis Punya Rekening

JAKARTA -GP- Pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga Indonesia yang genap memasuki usia 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar setiap warga harus memiliki rekening perbankan atau rekening koran.

"Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran," ujarnya dalam acara Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).

Dua bank yang dipilih pemerintah untuk pembuatan rekening ini adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).



DISWAY

Oleh: Dahlan Iskan



BOY SLAMETHARIAN DISWAY: Dahlan Iskan saat sarasehan di acara "muktamar" perusuh Disway di FIC Farm, 23 Agustus 2026.

Serius Nonsense

KETIA menulis desil kemarin saya tidak membahas tentang desilnya Indonesia. Saya membahas desil itu sendiri. Karena itu saya tidak merasa terikat dengan cara Indonesia: desil satu untuk golongan termiskin, desil 10 untuk yang terkaya.

Dalam dunia perdesilan tidak ada "hukum desil". Suka-suka. Saya lebih suka menyebut desil 10 untuk yangtermiskin, desil 1 untukyangterkaya. Pun dalam kuantil. Cara pandang seperti itu lebih asosiatif: Satu persen penduduk menguasai kekayaan berdesil-desil.

Bersambung ke Hal.2

POLEMIK EKS RUMAH JAWATAN ADHAN UNGKAP KEJANGGALAN



Upacara pengibaran Bendera Merah Putih di depan Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf tahun 1942 (sumber: ANRI dalam BPCB, 2018)

GORONTALO -GP- Polemik eks Rumah Jawatan Kantor POS dan Telegraf terus bergulir. Terbaru, beberapa kejanggalaan penetapan rumah tersebut sebagai cagar budaya oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) terungkap. Dalam naskah rekomendasi penetapan Eks Rumah Jawatan Kantor POS dan Telegraf Gorontalo sebagai cagar budaya yang diterbitkan pada tahun 2019, kesimpulan TACB tidak mencantumkan Pasal 15 yang bunyinya Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara, dan pasal 16 Undang-undang (UU) nomor 11 tahun 2010. Penerapan pasal ini, menurut Wali Kota Gorontalo,

Bersambung ke Hal.2

(SUMBER FOTO: DOKUMEN PRIBADI-ZAIN BADJEBER)

KANTOR POS - Suasana upacara pengibaran bendera pada 23 Januari 1942 di halaman kantor Pos dan Telegraf Gorontalo, peristiwa ini dikenal sebagai Hari Patriotik Gorontalo. Kantor Pos Gorontalo telah ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai Permenbud 10/2010.



Upacara pengibaran Bendera Merah Putih di depan Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf tahun 1942 (sumber: ANRI, dan satunya suasana penyambutan resmi Wali Kota Atje Slamet, tahun 1961, sumber dokumen pribadi saksi sejarah Zain Badjebber.

MELIPUT ERUPSI GAK Tim SAR Cari Lima Jurnalis Hilang Kontak

BANTEN - Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap lima jurnalis yang dilaporkan hilang kontak di sekitar perairan wilayah Pulau Sebesi dan Gunung Anak Krakatau, Banten.

Hingga semalam belum ada informasi terkait keberadaan maupun penemuan para jurnalis tersebut. "Sampai sekarang tim SAR masih mencari kelima jurnalis yang lost kontak. hingga pukul 16.44 belum ada informasi penemuan," kata Kepala Siaga SAR Banten, Wahyu dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 8 September 2026.

Bersambung ke Hal.2



(DOK. ISTIMEWA) ROMBONGAN jurnalis yang hendak melakukan peliputan Gunung Anak Krakatau dan dilaporkan hilang kontak.

WAGUB GORONTALO IDAH SYAHIDAH RH SALURKAN BANTUAN UMKM DI GORONTALO UTARA Bentuk Perhatian Pemerintah, UMKM Didorong Naik Kelas

(FOTO: DOK. DISKOMINFO/PTIK/PADLY):
WAGUB
Gorontalo
Idah
Syahidah
Rusli Habibie
memberikan
sambutan
pada
penyerahan
bantuan
bahan
produksi
untuk 105
pelaku UMKM
di Kabupaten
Gorontalo
Utara, Selasa
(8/9).



WAKIL Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie memastikan bantuan bahan produksi yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan. Hal itu disampaikannya saat menyerahkan bantuan bahan produksi untuk mendukung pengembangan usaha kepada 105 pelaku UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (8/9/2026).

WAGUB Idah menjelaskan, bantuan pemerintah diberikan sebagai bentuk perhatian sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan usaha yang dijalankan para pelaku UMKM. "Pemerintah memberikan bantuan ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Barang-barang yang diberikan juga semuanya berkualitas baik dan dipastikan tidak kedaluwarsa," ujar Idah.

Bahan produksi yang disalurkan

antara lain minyak goreng yang bukan merupakan minyak curah, tetapi produk berkualitas dan sudah dikenal masyarakat. Begitu pula dengan tepung terigu, tepung beras, gula, hingga margarin yang diberikan menggunakan produk dengan merek yang telah dikenal. Menurutnya, kualitas barang menjadi perhatian pemerintah agar bantuan yang diterima masyarakat benar-benar memberikan manfaat bagi pengembangan usaha.

Bersambung ke Hal.2

Adhan Ungkap Kejanggalan

dari halaman 1

Adhan Dambea sangatlah penting, karena lahan Eks Rumah Jawatan Kantor POS dan Telegraf merupakan hak milik pribadi.

Hal itu pun, lanjut Adhan, tertuang dalam naskah rekomendasi TACB, yang mana tahun 2004 sudah beralih status menjadi milik pribadi. “Sesuai bunyi pasal 16 poin ketiga, lahan itu harus dibeli atau ganti rugi. Ini isi

pasal 16 poin ketiga, pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau

Usia 17 Tahun Otomatis Punya Rekening

dari halaman 1

Ketika rekening ini dibuat, Airlangga mengatakan pemerintah akan memberikan uang untuk mengisi rekening tersebut sebesar Rp50 ribu per orang. Uang ini tidak bisa dipotong oleh pihak perbankan.

Ia menyebut akan ada regulasi yang mengatur agar uang Rp50 ribu tersebut tidak bisa dipotong oleh pihak perbankan.

“Nanti Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry

Irawan) bikin regulasinya supaya BI dan OJK kita minta untuk tidak bisa disedot,” ujar Airlangga. Menurut dia, rekening ini nantinya akan memiliki berbagai fungsi. Contohnya seperti penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai. Bagi pemilik rekening ini yang merupakan pelaku UMKM, ia mengatakan ada sistem pembayaran QR yang otomatis tersedia atau QRIS dan tanpa potongan.

“Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang. Diharapkan kalau dengan demikian ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah,” ujar Airlangga.

Ia mengatakan pemerintah menargetkan 200 juta penduduk dapat memiliki rekening bank tersebut. Guna merealisasikan program ini, pemerintah akan memanfaatkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri karena rekening akan dibuat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Hingga sekarang, Airlangga belum bisa menjelaskan mekanisme lebih lanjut dari rencana ini, termasuk apakah warga yang berusia 17 tahun otomatis mendapatkan rekening ketika membuat KTP atau masih harus melakukan pendaftaran lagi. **(net)**

Tim SAR Cari Lima Jurnalis Hilang Kontak

dari halaman 1

Sementara itu, berdasarkan laporan penyisiran dari Basarnas, Tim 1 diberangkatkan pada pukul 14.59 WIB menuju Pulau Sebesi dan Gunung Anak Krakatau untuk memastikan keberadaan para jurnalis tersebut. Dalam operasi ini, Tim Basarnas USS Pandeglang menerjunkan sejumlah personel, yakni Agus, Sulaiman, Bagas, Wisnu, dan Agung. Selain itu, satu personel tambahan, Dedi, turut bergabung dalam proses pencarian.

Tim melakukan penyisiran secara menyeluruh di sekitar wilayah Pulau Sebesi

dan Gunung Anak Krakatau sebagai upaya menemukan keberadaan para jurnalis yang hilang kontak. Meski demikian, hingga saat ini belum ada kepastian terkait informasi yang menyebutkan kelima jurnalis tersebut sempat menginap di Pulau Sebesi. Pihak SAR masih melakukan verifikasi terhadap kabar tersebut.

Perkembangan pencarian masih menunggu laporan terbaru dari tim di lapangan. SAR juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan para jurnalis agar segera melapor guna mempercepat proses pencarian. Sebelumnya, lima jurnalis

dari beberapa media berangkat dari Anyer menggunakan speedboat menuju kawasan Krakatau. Mereka terdiri dari Muhammad Bagus Khoirunas dari Antara, Arie Basuki dari Merdeka, Yudistiro dari iNews, Daus dari Anadolu, serta Donal yang berstatus freelance. Berdasarkan informasi terakhir, komunikasi sempat terjalin dengan salah satu jurnalis atas nama Muhammad Bagus Khoirunas yang merupakan fotografer Antara Biro Banten. Kontak terakhir terjadi sekitar pukul 16.00 WIB pada Senin, 7 September 2026, sebelum akhirnya seluruh rombongan tidak dapat dihubungi sama sekali. **(net)**

Serius Nonsense

dari halaman 1

Juga bisa sekaligus menjadi pengingat: desil satu adalah juara satu, desil dua juara dua, dan desil 10 adalah akar rumput yang jumlahnya banyak. Dalam perkastaan juga sama: kasta tertinggi di urutan satu. Bahkan di India ada golongan yang di bawah kasta keempat: golongan dalit.

Tapi ya sudahlah. Redaksi sudah mengubah tulisan saya itu, mungkin, redaksi terbawa arus komentar perusuh. Ternyata cara berpikir “perusuh Disway” lebuah ikut cara berpikir pemerintah. Ups...tidak juga. “Perusuh” ternyata juga berani kritis –pun termasuk dalam mengkritik Disway.

Itu tercermin dalam “Muktamar Perusuh” bulan lalu. Salah satu agenda “muktamar” itu sangat serius. Baru hari ini saya ungkapkan jalannya pembicaraan. Acara berat itu dimulai dengan pendaftaran agenda bahasan. Agar tidak ngelantur. Siapa saja boleh mendaftarkan agenda. Banyak yang unjuk jari. Mereka bicara pendek: hanya satu dua kalimat tentang poin yang ingin dibahas. Setelah inventarisasi ditutup mulailah kening mengkerut.

Saya sendiri hanya mengajukan satu agenda yang disambut dengan tawa. Padahal itu, menurut emosi saya, agenda berat: bagaimana cara melakukan pruning pentil durian. Pohon durian di antara rumah Manado dan lapangan basket di DIC Farm itu memang berbunga lebat. Banyak sekali.

Sudah banyak bunga yang jadi pentil. Kalau saja pentil-pentil itu jadi buah semua, satu pohon ini saja bisa menghasilkan lebih seratus durian. Itu tidak mungkin. Tahun lalu pohon ini sudah belajar berbunga. Bungan pertama lebat. Hampir semua bunga menjadi pentil. Yang akhirnya bisa jadi buah hanya 15. Itu pun ketika buah sudah sebesar bola tenis, berjatuhan satu per satu. Tersisa tiga saja yang selamat sampai tua.

Tiga itu saya biarkan sampai jatuh sendiri. Tiga-tiganya saya habiskan dalam waktu dua hari: jenis bawor- kalau tidak salah. Tahun ini saya ingin pentil yang jadi buah bisa lebih banyak. Saya tahun caranya: harus di-pruning. Justru ketika masih pentil harus dibuang sebagian besarnya. Dari ratusan itu tinggalkan sekitar 30 saja.

Doktrin itu benar. Tapi saya tidak pernah tega merontokkan paksa pentil-pentil itu. Kok kasihan. Juga karena saya tidak tahu pentil mana yang dipastikan akan membesar jadi durian – jangan-jangan yang digugurkan itu yang mestinya berbakat jadi durian.

Agendanya: Siapa di antara perusuh Disway yang tega melakukan pruning dan mau jadi relawan untuk melakukannya: satu orang angkat tangan.

Enam perusuh lainnya angkat tangan untuk mendaftarkan agenda yang benar-benar berat. Satu orang mengajukan satu agenda pembahasan. Terkumpul enam agenda yang dipadatkan menjadi empat: koperasi, kebijakan terhadap pengusaha, single data nasional, dan kegelisahan apa yang saya alami melihat kondisi ekonomi saat ini.

Ketika membahas koperasi, silang pendapat bertautan. Meski tidak ada agenda pembahasan Koperasi Desa Merah Putih, terpaksa banyak disinggung juga.

Perusuh dari Lumajang menginginkan kelompok-kelompok masyarakat membangun koperasi sendiri. Contohnya ia sendiri. Ia sudah menjalankan dan membuktikan: petani bisa lebih baik bergabung dengan koperasi tani. Sebaiknya kelompok lain punya koperasi di bidangnya masing-masing. Jangan seperti KDMP – ada yang keseleo lidah menjadi KDRT.

Persoalan utamanya disepakati: sulit mencari orang yang mau all out menjadi penggerak koperasi seperti perusuh asal Lumajang itu. Padahal yang diperlukan Indonesia bukan satu dua orang. Kita perlu ribuan bahkan ratusan ribu orang seperti itu. Sulit. Tidak realistis untuk gerakan totalitas nasional.

Memang orang seperti itu bisa dipersiapkan. Mulai rekrutmennya yang benar, pendidikan, pelatihan, sampai pemagangan. Tapi siapa yang bisa menyiapkannya. Mestinya pemerintah. Tapi semua sepakat pemerintah bukan pihak yang mampu melakukannya. Bagus tapi sulit. Tidak realistis.

Sebenarnya banyak contoh koperasi yang bisa sukses. Yang paling hebat adalah koperasi Keling Kumang yang di Kalbar itu. Koperasinya suku Dayak di Sekadau, Sintang. Besaran skalanya sudah tiga triliun rupiah.

Tapi ya hanya satu itu. Atau satu dua lagi lainnya di tempat lain di Indonesia. Di Jatim sendiri pernah ada koperasi sangat besar. Koperasi susu milik peternak sapi perah di Pujon, Malang. Lalu ada koperasi wanita yang sangat mulia. Tapi yang di Pujon sudah jarang disebut lagi. Yang “wanita” tokoh utamanya tergiur ke partai politik. Selesai.

Bagus. Bisa terwujud. Tapi jatuh bangun. Belum bisa mewarnai perekonomian nasional yang langgeng. Semua itu mutiara di Khatulistiwa. Tapi mutiara yang bersinar hanya beberapa di wilayah.

Ada perusuh yang membanggakan keberhasilan koperasi di Belanda, Swedia, dan bahkan Singapura. Itu benar. Sangat membanggakan. Sering jadi contoh untuk mengolok-olok pemerintah yang dianggap kurang memperhatikan koperasi di Indonesia.

Anggapan kita seolah di sana koperasi sudah sangat berhasil. Sudah menjadi gerakan nasional. Jarang yang kritis bahwa sebesar dan sesukses mereka tetap saja belum sampai bisa membuat sistem ekonomi di sana menjadi sistem koperasi. Sistem ekonomi negaranya tetap saja kapitalis.

KUD juga pernah sukses –sebagai lambang turun tangannya negara untuk menggalakkan koperasi. Dengan sangat serius. Presiden Soeharto sendiri yang turun tangan. Dibangunnya di setiap kecamatan merata ke seluruh Indonesia. Ternyata juga tidak berkelanjutan. Maka, mungkin saja, KDMP adalah bulldoser terakhir Untuk mewujudkan sistem koperasi. Saya sebut bulldoser karena dipaksakan dari atas, dalam skala yang tidak terpermana, dan menghabiskan anggaran yang tidak terkirakan. Bukan pula di setiap kecamatan melainkan di setiap desa.

Kalau KDMP pun kelak ternyata gagal, makan cara apa lagi yang akan dipakai untuk menjalankan ekonomi nasional secara koperasi sebagai pelaksanaan pasal 33 UUD 1945.

Saya selalu tertarik pada pikiran Dr Agus Pakpahan yang kini menjadi rektor Universitas Koperasi Indonesia. “Sampai hari ini kita belum punya kurikulum pelajaran koperasi yang sebenarnya,” ujarnya. Mata pelajaran koperasi yang diajarkan selama ini, katanya, bukan ilmu koperasi dimaksud.

KDMP adalah taruhan terakhir bagi uji coba koperasi. Taruhan yang amat sangat luar biasa mahal. Kalau gagal berarti kita harus ikut Agus Pakpahan: menyusun kurikulum dan silabus ilmu koperasi, mengajarkannya dari TK, SD, SMP, SMA, universitas. Setelah semua orang Indonesia tahu apa itu koperasi barulah dimulai membangun koperasi: 25 tahun lagi.

Separo waktu pun habis untuk membahas koperasi. “Ini pertemuan terbaik yang pernah saya ikuti,” ujar alumnus Geologi ITB yang kini berusia 85 tahun Sujatmiko. Yang terlibat pembahasan bicaranya singkat dan padat. Fokus. Berhasil tidak ada yang ngelantur. Tidak ada yang bicara nonsense. Saya tidak berani kembali ke bawah pohon durian: tidak sampai hati melihat ratusan pentil segar itu dirontokkan. (*)

putusan pengadilan,” jelas Adhan.

“Tak heran jika sang pemilik, Ibu Ledy Pranata Widjaja menggugat ke Pengadilan Negeri Gorontalo yang melahirkan keputusan akta perdamaian nomor 25/Pdt.G/2025/PN Gto, yang poin ketiganya memerintahkan tergugat, yakni kami Pemerintah Kota Gorontalo melakukan kajian atas SK Wali Kota Gorontalo no. 126/10/II/2020 tertanggal 7 Februari 2020 paling lama 30 hari kalender sejak perdamaian ini disepakati,” sambung Adhan.

Lebih lanjut, Adhan yang mengantongi naskah rekomendasi penetapan Eks Rumah Jawatan Kantor POS dan Telegraf Gorontalo

sebagai cagar budaya mengungkap bahwa yang dijadikan dasar TACB yakni pasal 5, 7, 42, 43, dan 44.

Masih kata Adhan, yang lucunya lagi, dalam naskah rekomendasi TACB, Kantor POS dan Telegraf diusulkan menjadi cagar budaya. Padahal, bangunan tersebut telah ditetapkan sebagai cagar budaya pada Peraturan Menteri dan Kebudayaan nomor 10 tahun 2010.

“Jangan-jangan TACB tidak tahu Permen itu,” kata Adhan tersenyum.

Di foto tersebut, keterangan foto tertulis: Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di Depan Rumah Jawatan Kantor POS dan Telegraf tahun 1942. “Sementara kita ketahui bersama, upacaranya di Kantor POS, bukan di Eks Rumah Jawatan Kantor POS,” ujar Adhan. Tak sampai disitu, foto yang mirip juga ada keterangan foto: penyambutan resmi Wali Kota Atje Slamet di Kompleks Eks Kantor POS tahun 1961.

Salah satu foto yang dikantongi tokoh masyarakat Gorontalo yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Gorontalo. “Yang paling mencengangkan lagi, jika dilihat secara detail ada perbedaan yang sangat menyolok kondisi kantor POS Gorontalo pada foto yang digunakan TACB dengan foto milik saksi sejarah pak Zain Badjeber,” tuturnya.

“Jangan-jangan ada pihak yang memalsukan peristiwa sejarah. Kita lihat saja nanti, yang jelas ini akan kami adukan,” tutup Adhan. **(hargo)**

Bentuk Perhatian...

dari halaman 1

“Pemerintah tidak asal memberikan bantuan, apalagi dengan produk-produk yang tidak berkualitas. Semua kita perhatikan kualitasnya agar bantuan ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelasnya. Selain memberikan dukungan bahan produksi, Idah juga mendorong pelaku UMKM untuk terus melakukan inovasi agar produk yang dijual lebih menarik dan sesuai dengan selera masyarakat saat ini. Ia mencontohkan, pelaku usaha gorengan dapat mengembangkan produk seperti bakwan crispy atau telur crispy.

“Gorengan juga dapat dikemas dalam bentuk yang lebih menarik, misalnya dibuat dalam ukuran kecil, ditusuk seperti sate, maupun ditambahkan saus. Jangan lupa juga buat spanduk yang menarik,” sarannya. Adapun total bantuan yang diserahkan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara mencapai Rp262,5 juta, dengan masing-masing penerima mendapatkan bantuan senilai Rp2,5 juta. **(tro/*)**



Salurkan Infak Dan Waqaf Terbaik Kita Untuk Pembangunan

GORONTALO ISLAMIC CENTRE

DI BANK MUAMALAT

NO REK : 8120999999



LAPORAN KEUANGAN

MASJID RAYA- GORONTALO ISLAMIC CENTRE

Saldo tanggal 9 Januari 2026	
Bank Muamalat	Rp 3.248.580.793
Bank BSG	Rp 372.045.645
Total Saldo	Rp 3.620.626.438
Total Pertambahan Saldo setelah dikurangi pengeluaran selang 30 Mei s/d 12 Juni 2026	
	Rp 106.454.766



UPAYA PEMADAMAN KARHUTLA DI ACEH BARAT

Sejumlah personel Polres Aceh Barat melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan lahan gambut Desa Leukeun, Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Selasa (8/9/2026). Polres Aceh Barat mengerahkan puluhan personel dan menempuh perjalanan sejauh delapan kilometer melalui jalan setapak di hutan menuju lokasi karhutla untuk melakukan penyekatan dan pemadaman guna mencegah api meluas ke permukiman.

Polda Papua Siagakan Seluruh Polres Hadapi Karhutla

JAYAPURA, 08/9 (ANTARA) - Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito mengatakan, Polda Papua saat ini telah menyiapkan seluruh polres untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Polda Papua saat ini membawahi 21 polres dan polresta serta jajarannya yang tersebar di tiga provinsi itu dalam kondisi siaga. "Personel Polri yang bertugas di wilayah hukum Polda Papua diminta untuk waspada dan siaga dalam menghadapi karhutla," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito, Selasa, di Jayapura. Dikatakan, Polda Papua melalui Direktorat Reskrimsus telah membuka posko untuk melakukan pemantauan hotspot secara berkelanjutan dengan memanfaatkan aplikasi Lapan Fire Hotspot sebagai salah satu langkah deteksi dini terhadap potensi

terjadinya karhutla. Personel yang bertugas di posko tersebut yang nantinya melaporkan bila ada titik api di wilayah hukum Polda Papua. “Laporan dilakukan secara berjenjang dan untuk memastikan karhutla, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPBD, BNPB, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, instansi terkait lainnya untuk melakukan pemadaman,” kata Kombes Cahyo. Kabid Humas Polda Papua mengimbau agar masyarakat segera melaporkan bila melihat titik api sehingga dapat segera dipadamkan sebelum makin meluas. Selain itu jangan membakar sampah sembarangan dan tidak ditunggui karena dapat menyebabkan api makin membesar hingga terjadi kebakaran, kata Kombes Cahyo. (*)

Pewarta : Evarukdijati

PRABOWO SIAPKAN KAPAL INDUK

Helikopter dan Drone untuk Hadapi Bencana

JAKARTA, 07/9 (ANTARA)

- Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk dari Italia akan segera masuk ke jajaran TNI Angkatan Laut dan nantinya dimodifikasi untuk mendukung pengoperasian helikopter serta drone. Ia menyampaikan rencana tersebut saat memimpin rapat terbatas yang membahas perkembangan penanganan bencana melalui konferensi video di Jakarta Senin. “Alhamdulillah sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita ubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone,” jelas Presiden Prabowo dipantau melalui siaran langsung Sekretariat Presiden. Menurutnya, kapal tersebut nantinya mampu menampung hingga 10 helikopter kelas



Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan sejumlah bencana di Indonesia secara virtual di Jakarta, Senin (7/9/2026).

menengah. Presiden Prabowo menyebut helikopter yang dapat dioperasikan dari kapal tersebut antarlain memiliki kemampuan seperti Black Hawk dan Mi-17 yang rata-rata dapat membawa sekitar 4-5 ton air. Dengan

kapasitas tersebut, Prabowo menilai keberadaan kapal dan helikopter akan memperkuat respons pemerintah dalam menangani kebakaran hutan, terutama ketika terdapat titik api dalam jumlah besar. “Jadi

kalau kita punya 10 helikopter bisa segera merapat ke titik api yang terbanyak. Ini juga akan sangat membantu respons kita,” kata Presiden Prabowo. Presiden Prabowo menekankan rencana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Menurut Prabowo, berbagai sarana penanganan bencana harus dipersiapkan jauh sebelum bencana terjadi sehingga pemerintah dapat merespons dengan cepat ketika keadaan darurat muncul. “Jadi kita persiapan mengatasi mitigasi, jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya harus kita siapkan,” ujar Presiden Prabowo. (*)

Pewarta : Maria Cicilia Galuh
Prayudhia

Pemprov Gorontalo Salurkan Bantuan Produksi untuk 105 UMKM

GORONTALO, 08/9

(ANTARA) - Pemerintah Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan bahan produksi kepada 105 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Gorontalo Utara dengan total anggaran Rp262,5 juta untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan usahanya. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Kumperindag) Provinsi Gorontalo Faisal Lamaraka di Gorontalo, Selasa, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program Pengembangan Usaha Tahun 2026 yang menasar pelaku UMKM di seluruh kabupaten/kota. "Gorontalo Utara menjadi daerah terakhir yang menerima penyaluran bantuan. Untuk daerah ini, bantuan diberikan kepada 105 UMKM dengan total anggaran sebesar Rp262,5 juta," katanya. Bantuan diserahkan

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie di Kantor Camat Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa. Ia menjelaskan setiap pelaku UMKM menerima bantuan bahan produksi senilai Rp2,5 juta yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan produksi sekaligus menunjang pengembangan usaha. Bantuan tersebut diberikan kepada empat kategori pelaku UMKM, yakni pemilik kios, warung makan, penjual gorengan, serta penjual kue basah dan kue kering. Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam membantu masyarakat mempertahankan sekaligus mengembangkan usaha yang dijalankan. Ia juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan bantuan



(ANTARA/HO-DISKOMINFOTIK PROVINSI GORONTALO)

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie bersama Wakil Bupati Gorontalo Utara dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan masyarakat pelaku UMKM penerima bantuan bahan produksi di Kantor Camat Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (8/9).

tersebut secara produktif dan terus melakukan inovasi, termasuk mengembangkan produk agar lebih menarik serta sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat. Penyaluran bantuan kepada 105 UMKM di Gorontalo Utara sekaligus

melengkapi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Tahun 2026 yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo di sejumlah kabupaten/kota. (*)

Pewarta: Faradila Alim

FOTO CERITA

Pergulatan Menaklukkan Api Kebakaran Hutan dan Lahan



MUSIM kemarau kembali melanda Kalimantan Tengah, provinsi terluas di Indonesia dengan luas wilayah mencapai 15,3 juta hektare. Dari luasan tersebut, lebih dari 4,6 juta hektare di antaranya merupakan lahan gambut. Di tengah kondisi cuaca yang panas, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kerap terjadi. Apalagi, tahun ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak fenomena El Nino berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Saat cuaca panas, karhutla lebih mudah terjadi. Kondisi tersebut diperparah dengan angin kencang yang dapat memicu api menjalar dan membesar. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBPK), hingga 22 Agustus 2026, luas area yang terbakar mencapai 4.729,25 hektare dari 1.686 peristiwa.

Ketika titik panas muncul dan tanda-tanda kepulan asap membumbung tinggi, petugas maupun relawan segera beranjak menuju lokasi untuk menghampiri titik api yang sedang berkobar. Dalam proses

pemadaman karhutla, nyawa petugas dipertaruhkan untuk menghadapi berbagai kendala yang harus ditaklukkan. Mereka harus melawan kobaran api yang meraung-raung di tengah kepulan asap, menebas semak belukar hingga membuka jalur menuju kepala api. Tak jarang, akibat terbatasnya sumber air untuk pemadaman, petugas terpaksa membuat sumur bor baru.

Pergulatan melawan karhutla tidak pernah berlangsung mudah. Petugas kerap menghadapi berbagai kendala di lapangan. Oleh sebab itu, penanganan karhutla membutuhkan tenaga yang besar, waktu, peralatan, strategi, hingga koordinasi yang tepat agar proses pemadaman dapat berlangsung secara efektif dan terkendali. Tatkala kebakaran terjadi di lahan gambut, tantangan petugas semakin berat. Api tidak hanya membakar lahan di permukaan, tetapi juga merambat dan bertahan di lapisan gambut. Bara yang tersimpan di dalam tanah gambut sulit dideteksi dan dipadamkan sehingga api dapat kembali berkobar meskipun

permukaan tanah tampak telah berhasil dipadamkan. Di lokasi tertentu, penyekatan dilakukan dengan menyemprotkan air ke semak belukar untuk mencegah dan membatasi pergerakan api agar tidak menjalar hingga meluas. Tak jarang mereka harus berjibaku melawan api hingga larut malam.

Sebagai upaya kesiapsiagaan menghadapi meningkatnya potensi karhutla, Kepala Pelaksana BPBPK Ahmad Toyib mengungkapkan bahwa sejumlah personel darat maupun udara diterjunkan untuk menanggulangi kebakaran. “Seluruh personel, baik satgas udara, satgas darat, maupun tim pendukung operasi, kami kerahkan secara optimal sesuai tugas dan fungsinya. Fokus kami memastikan setiap titik api dapat segera terdeteksi dan ditangani secepat mungkin agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih meluas,” tuturnya. Sebanyak 10.700 personel gabungan yang terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, Dinas Kehutanan, TNI, Polri, hingga relawan dikerahkan. Dalam

mitigasi karhutla, jalur darat menjadi ujung tombak untuk menjangkau titik-titik kebakaran karena mampu menyempatkan diri secara langsung ke kepala api. Untuk mendukung tim darat memadamkan api, dukungan dari jalur udara juga dilakukan dengan menerjunkan empat helikopter A water bombing yang ditugaskan menatuhkan air ke lokasi yang terbakar dan lahan yang sulit dijangkau petugas darat. Sementara itu, satu pesawat Cessna digunakan untuk operasi modifikasi cuaca dengan menaburkan natrium klorida (NaCl) untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan. Satu helikopter lainnya digunakan untuk melakukan patroli guna mendeteksi titik-titik kebakaran. Kolaborasi berbagai pihak tersebut tentu menyita banyak waktu, tenaga, hingga biaya. Namun, segala daya dan upaya terus dilakukan demi padamnya api, hilangnya asap, serta kembalinya kehidupan masyarakat tanpa ancaman karhutla. (antara)

Foto dan teks : Auliya
Rahman



Sidang Korupsi Kuota Haji

200 Jatah Haji Berlabel BIN Terungkap

JAKARTA - Sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 kembali mengungkap fakta mengenai alokasi kuota haji untuk sejumlah pihak tertentu.

Salah satu catatan yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah adanya alokasi 200 kuota dengan label “BIN”. Fakta tersebut terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasikan catatan estimasi pembagian kuota dalam laptop milik mantan honorer Kementerian Agama (Kemenag), Ridwan Kurniawan.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (8/9), Ridwan mengakui bahwa dirinya mengetik langsung catatan tersebut. Proses pengetikan dilakukan bersama Abdul Muhyi, yang pernah menjabat Kepala Seksi Pendaftaran Haji Khusus periode 2014-2020.

Ridwan menjelaskan, saat menyusun catatan tersebut, Abdul Muhyi melihat sejumlah rujukan data melalui telepon selulernya. Dari dokumen yang kemudian diperlihatkan jaksa, terdapat sejumlah alokasi kuota yang ditujukan kepada berbagai pihak.



Terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji yang juga Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Catatan itu antara lain memuat alokasi untuk Subdit sebanyak 1.500 kuota, Rizky Visa (RF) 500 kuota, Maktour (MKTR) 1.000 kuota, DPR 200 kuota, Para Gus 200 kuota, NU 1.900 kuota, serta BIN sebanyak 200 kuota. Jaksa kemudian menyoroti kode “BIN” yang tercantum dalam catatan tersebut. Ridwan membenarkan bahwa kode itu merujuk pada anggota Badan Intelijen Negara (BIN). “BIN kalau di kami Pembinaan pak. BIN ini apa?” tanya jaksa di ruang persidangan. BIN waktu

itu merujuk ke anggota BIN maksudnya,” jawab Ridwan. Ketua majelis hakim Ni Kadek Susantiani kemudian meminta Ridwan memperjelas maksud pencantuman alokasi tersebut. Hakim ingin memastikan apakah 200 kuota yang dicatat dengan label BIN memang dimaksudkan untuk institusi intelijen negara. “Anggota BIN maksudnya siapa tuh?” Diperjelas. Maksudnya Badan Intelijen? tanya hakim. “Eh, ya,” ucap Ridwan. “Badan Intelijen Negara

dapat jatah juga? Gitu?” cecar hakim. “Saya kurang tahu, waktu itu hanya menulis,” tutur Ridwan. Hakim kembali menggali siapa yang membuat catatan tersebut. Ridwan menegaskan bahwa dirinya hanya bertugas mengetik berdasarkan arahan Abdul Muhyi. “Yang nulis ini siapa?” tanya hakim kembali. “Yang ngetik saya atas arahan Pak Muhyi,” jelas Ridwan. Ridwan dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji yang menjerat empat terdakwa.

Mereka adalah mantan Menteri Agama 2019-2024, Yaqut Cholil Qoumas; Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex; Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham; serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba. Selain Ridwan, Jaksa KPK turut menghadirkan tiga saksi lainnya dalam persidangan, yakni Abdul Muhyi, Nila Adulitya Devi dari pihak swasta, dan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Saiful Mujab. Perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 622.090.207.166,41 atau sekitar Rp 622 miliar. (jp)

Febrie Adriansyah Dicecar soal Tan Kian



Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah (diborgol) tiba di gedung utama Kejaksaan untuk menghadiri pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU, Selasa (8/9). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

JAKARTA - Mantan Jaksa Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah ditanya soal dugaan hubungan dengan pengusaha properti Tan Kian saat diperiksa penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung selama hampir tujuh jam. Dalam pemeriksaan itu, Febrie dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan/atau PT Asuransi Jiwasraya. “Tadi ada 22 pertanyaan seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain, tidak ada tadi. Lebih ke terkait dengan Tan Kian,” kata Kuasa Hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, dikutip ANTARA, Selasa. Ia mengungkapkan bahwa penyidik menanyakan kenal atau tidaknya Febrie dengan Tan Kian. Selain itu, penyidik juga menggali ada atau tidaknya uang yang diterima Febrie dari Tan Kian. Atas pertanyaan tersebut, ia mengatakan bahwa kliennya secara tegas menjawab tak memiliki hubungan dengan Tan Kian. “Pak FA (Febrie Adriansyah) tegas sekali mengatakan tidak ada penerimaan dari Tan Kian. Itu clear sekali disampaikan lebih lanjut,” katanya. Tidak hanya itu, penyidik juga menanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan penanganan perkara korupsi PT ASABRI dan Jiwasraya. “Pertanyaan lebih pada memperdalam apa yang sebelumnya pernah ditanya, di pemeriksaan sebagai tersangka yang pertama kali beberapa waktu yang lalu,” ujar Febri. Berdasarkan pantauan ANTARA, Febrie Adriansyah tiba di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, pada sekitar pukul 10.02 WIB. Lalu, Febrie terpantau keluar dari gedung pada pukul 16.42 WIB. Sebelumnya, Kejaksaan menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) setelah menerima pengalihan perkara dari Polri. Sprindik tersebut mencakup dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara di PLTU yang diduga memicu pemadaman listrik, serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT ASABRI dan/atau Jiwasraya. Dalam perkara korupsi penanganan perkara, Polri menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU, sedangkan pengacara Don Ritto ditetapkan sebagai tersangka TPPU. Selain itu, Kejaksaan juga menerbitkan sprindik keempat untuk mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal korupsi setelah menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Polri berupa emas seberat 74 kilogram serta uang valuta asing senilai ratusan miliar rupiah. (antara)



BMKG mengonfirmasi delapan Bandara telah membuka kembali operasional penerbangan. (foto: istimewa)

BMKG Pastikan 8 Bandara Aman dari Abu Vulkanis

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa delapan bandar udara yang sebelumnya ditutup, kini aman dari paparan abu vulkanis Gunung Anak Krakatau setelah hasil paper test negatif. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan pihaknya melakukan verifikasi paper test secara berkala di ruang udara dan area landasan untuk melengkapi pemantauan citra satelit, serta data meteorologi penerbangan. “Hasil pengamatan paper test per pukul 06.00 WIB menyatakan bahwa delapan bandara yang sebelumnya ditutup operasionalnya dinyatakan negatif dari paparan abu vulkanis,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/9). Menindaklanjuti

jaminan keamanan tersebut, Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) menerbitkan Notice to Airmen (NOTAM) pembukaan kembali operasional penerbangan secara bertahap sejak Selasa dini hari hingga pagi. Adapun tiga bandara utama dibuka sejak dini hari, yakni Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang) pukul 00.30 WIB, Bandara Halim Perdanakusuma (Jakarta) pukul 00.40 WIB, dan Bandara Husein Sastranegara (Bandung) pukul 00.42 WIB. Selanjutnya, operasional disusul oleh Bandara Budiarto Curug (Tangerang) pukul 01.25 WIB, Bandara Pondok Cabe (Tangerang Selatan) pukul 01.28 WIB, Bandara Muhammad Taufiq Kiemas (Pesisir Barat) pukul 09.31 WIB,

Bandara Radin Inten II (Lampung) pukul 09.45 WIB, serta Bandara Salakanagara Tanjung Lesung (Banten) pukul 09.50 WIB. Baca Juga: Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menambahkan pergerakan abu vulkanis Gunung Anak Krakatau berada pada ketinggian hingga 7.000 kaki atau 2,13 kilometer yang bergerak ke arah selatan-barat daya mencakup Banten bagian barat laut dengan kecepatan 5-10 knot. BMKG memastikan terus berkoordinasi dengan otoritas penerbangan dan pengelola bandara untuk memastikan ruang udara nasional aman bagi penerbangan komersial maupun penanggulangan bencana. (jppn)



Purbaya Yudhi Sadewa

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), memastikan ada dana Rp 950 miliar yang siap digunakan untuk penanganan bencana di Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, anggaran untuk penanganan bencana disesuaikan dengan kebutuhan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Punya Rp 900 miliaran (Rp 950 miliar) siap pakai.

Kemenkeu: Rp 950 M Dana Bencana Siap Pakai

Itu pun belum habis, nanti kalau itu kurang ya diajuin lagi ke saya, saya tambah,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa (8/9). Ia mengatakan, dari total alokasi dana cadangan penanggulangan bencana sebesar Rp 5,7 triliun yang dialokasikan setiap tahun, sebagian telah diserap untuk penanganan bencana di sejumlah daerah, termasuk Aceh. Purbaya mengatakan, dana sebesar Rp 950 miliar berasal dari dana cadangan yang telah disiapkan oleh Kemenkeu. Pasalnya, dari total dana cadangan sebesar Rp 5,7 triliun untuk BNPB sebagian masih berada dalam anggaran. Purbaya menekankan bahwa Kementerian Keuangan memberikan perlakuan khusus terhadap penganggaran bencana alam karena menyangkut

keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan membatasi alokasi dana jika BNPB mengajukan usulan penambahan anggaran. “Untuk anggaran bencana gak usah khawatir, kita akan siapkan anggaran sebanyak yang dibutuhkan. Kalau bencana treatment-nya beda, akan kita utamakan karena menyangkut kemampuan hidup masyarakat dalam bertahan menghadapi bencana,” ucapnya. Sebagaimana diketahui, berdasarkan catatan Kemenkeu, dari pagu BNPB sebesar Rp 5,7 triliun, dana penanganan bencana yang siap pakai tercatat sekitar Rp 950 miliar. Saat ini, realisasi penyerapan anggaran BNPB tercatat telah mencapai angka Rp 2,6 triliun. (jp)

HARIAN PAGI PERTAMA DAN TERBESAR DI GORONTALO

GORONTALO Post

Penerbit : PT. GORONTALO CEMERLANG
Pembina : Dahlan Iskhan
Komisaris Utama : Imawan Mashuri
Komisaris : Urief Hasan
Direktur Utama : Moh. Sirham
Direktur : Haryono
Direktur Marketing : Hariyanto Hamzah

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Jitro Paputungan

■ DIVISI PRODUKSI

Redaktur Pelaksana: Roy Tilameo, Rahmat Malik.
Redaktur: Zulkifli Tampolo. **Staf Redaksi**:
Sekretaris Redaksi: Agustina Said. **Koordinator HRD**: Chicilia Novistiuti Arifin. **Koordinator** IT: Aslan Akuba

■ DIVISI ART & PERWAJAHAN

Risdiyanto Karim, Nasir Hantono, Apri Ahmad. **Design Grafis**: Muhammad Syukri

■ DIVISI USAHA

Manager Keuangan: Elvin Ambo. **Adriyanti Kadir (adm)**. **Manager Iklan**: Hariyanto Hamzah.

Staf Iklan: Aminum Humola, Surya Muhamad **Design Iklan**: Oman Nasiboe.

Manager Sirkulasi & Pemasaran: Yusuf Saleh. **Pemasaran Koran**: Buyung Tanjung, Yersi Ismail, Welniaty Ahaya (adm).

■ LAYANAN PELANGGAN DAN IKLAN

Tarif Iklan: Umum Rp. 30.000,-/mmk (hitam putih/BW).
Rp 40.000,-mmk (berwarna/FC). **Mungil**: Rp 35.000 (satu kali muat). **Advertorial**: Rp 22.500,-mmk (berwarna), Rp 15.000,-mmk (hitam putih/BW). **Harga Langganan Koran**: Rp 150.000 (luar kota tambah ongkos kirim)

■ ALAMAT

Kantor Pusat: GEDUNG GRAHA PENA GORONTALO
Jln. Jhon A. Katili (Eks Jln. Andalas). No. 144 Kota Gorontalo. Telepon: (0435) 827551.
E-mail Redaksi: redaksi_gp@yahoo.com, redaksi.gpost@gmail.com, Hargo.co.id.
E-mail Iklan: iklan_gp@yahoo.com, iklangp@yahoo.com. E-mail Sirkulasi & Pemasaran: marketing_gp@gmail.com.

Perwakilan Jakarta: Jln. Kebayoran Lama no. 12 Jakarta Barat.

Surabaya: Jln Ketintang Permai, Blok BD No. 17, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Bantuan Beras Tembus 68 Ribu KK



Penyaluran beras bantuan periode Juli, Agustus, dan September 2026 tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Bupati Gorontalo Sofyan Puihi di Kelurahan Hunggalua, Kecamatan Limboto, Selasa (8/9).

Bupati Sofyan: Jangan Dijual

LIMBOTO - Kuota penerima bantuan pangan beras di Kabupaten Gorontalo melonjak 20 ribu keluarga. Tahun ini, jumlah penerima mencapai 68 ribu KK, dengan total bantuan 30 kilogram beras untuk setiap keluarga.

Tambahan kuota tersebut membuat jangkauan bantuan pangan pemerintah semakin luas di Kabupaten Gorontalo. Penyaluran untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026 mulai diserahkan kepada masyarakat, Selasa (8/9).

Penyerahan secara simbolis dilakukan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Bupati Gorontalo Sofyan Puihi di Kelurahan Hunggalua, Kecamatan Limboto.

Sofyan menyambut penambahan kuota tersebut. Menurutnya, bantuan beras menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga kebutuhan pangan sekaligus membantu daya

beli masyarakat.

Namun, di balik penambahan jumlah penerima itu, Sofyan mengingatkan warga agar bantuan yang diterima tidak disalahgunakan.

"Bantuan ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dapur keluarga. Jangan sampai dijual kembali," tegas Sofyan.

Ia mengatakan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Bulog untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan ketersediaan pangan masyarakat tetap terjaga.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail berharap bantuan 30 kilogram beras per KK tersebut dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan tambahan 20 ribu penerima, bantuan pangan tahun ini menjadi salah satu intervensi pemerintah yang menjangkau lebih banyak keluarga di Kabupaten Gorontalo. (adv)

Pemda-DPRD Kebut KUA-PPAS 2027

LIMBOTO - Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 Kabupaten Gorontalo dikebut. Pemerintah Kabupaten Gorontalo, bersama DPRD menargetkan dokumen anggaran tersebut sudah dapat dibawa ke rapat paripurna paling lambat pekan depan.

Target itu menjadi fokus pembahasan intensif Pemkab dan DPRD selama dua hari di Bukit Proja. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama legislatif mengurai kembali program dan alokasi

anggaran untuk memastikan belanja daerah tetap berpijak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, mengatakan pembahasan antara TAPD dan DPRD sejauh ini berjalan lancar. Evaluasi dilakukan terhadap setiap program prioritas agar alokasi anggaran tidak melenceng dari sasaran. "Setiap program prioritas kami evaluasi satu per satu untuk memastikan alokasinya tepat sasaran. Rencana anggaran ini

menyerap langsung aspirasi teman-teman di DPRD agar manfaatnya dirasakan nyata oleh warga," kata Sugondo, Selasa (8/9).

Selain membahas angka-angka anggaran, Pemkab dan DPRD juga menyelaraskan KUA-PPAS dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyelarasan ini menjadi bagian penting agar program pembangunan yang masuk dalam APBD 2027 tetap sejalan dengan arah kebijakan daerah. Sugondo mengatakan, pembahasan ditargetkan

segera rampung sehingga tahapan penyusunan APBD 2027 tidak ikut tersendat. Jika seluruh kesepakatan antara eksekutif dan legislatif telah final, dokumen KUA-PPAS 2027 akan langsung diajukan ke rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo. Dengan ritme pembahasan yang dipercepat, Pemkab Gorontalo berharap APBD 2027 dapat ditetapkan tepat waktu dan segera menjadi pijakan pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik tahun depan. (adv)



Pemda Kab. Gorontalo bersama DPRD mematangkan pembahasan KUA-PPAS APBD 2027, Selasa (8/9).

BERKENDARA SAAT HUJAN ABU DAN ASAP

Honda Bagi Tips Agar Tetap Nyaman

JAKARTA - Hujan abu vulkanik dapat membuat aktivitas berkendara menjadi lebih berisiko. Partikel abu vulkanik dapat mengganggu aktivitas berkendara anda, oleh karena itu pengendara perlu menggunakan perlengkapan tambahan, meningkatkan kewaspadaan dan fokus saat berkendara. Jika perjalanan tidak mendesak, menunda perjalanan hingga kondisi kembali aman menjadi pilihan yang paling tepat. Sedangkan bagi pengendara yang harus tetap melakukan perjalanan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Persiapkan Diri dan Kendaraan

Sebelum berangkat, pastikan perlengkapan berkendara digunakan secara lengkap seperti helm dengan visor tertutup untuk membantu melindungi bagian wajah dan mata. Gunakan masker yang mampu menyaring partikel

halus dan kacamata tambahan yang dapat memberikan perlindungan dari iritasi pada mata bila terpapar langsung. Kondisi visor helm juga perlu diperhatikan. Partikel abu yang menempel dapat mengganggu pandangan. Membersihkan visor secara sembarangan karena partikel abu, berpotensi menggores permukaannya sehingga mengganggu pandangan.

Selain perlengkapan, kondisi kendaraan juga perlu diperiksa. Pastikan tekanan dan kondisi ban, sistem pengereman, lampu utama, lampu belakang, lampu sein, spion, serta kondisi mesin berfungsi dengan baik. Komponen kendaraan yang berkaitan dengan penyaring udara juga perlu diperhatikan karena abu vulkanik dapat masuk dan menumpuk pada bagian tersebut. Sebelum berangkat, pengendara juga sebaiknya memantau informasi resmi mengenai aktivitas gunung api, arah penyebaran abu, kondisi



CARI AMAN : Pastikan perlengkapan berkendara digunakan secara lengkap seperti helm dengan visor tertutup untuk membantu melindungi bagian wajah dan mata.

lalu lintas, serta kemungkinan adanya penutupan jalan.

Kurangi Kecepatan dan Jaga Jarak Aman

Saat berkendara di tengah hujan abu, pengendara perlu mengurangi kecepatan. Abu yang menutupi permukaan jalan, terutama ketika bercampur

dengan air, dapat membuat jalan menjadi lebih licin dan mengurangi daya cengkraman. Hindari melakukan manuver secara tiba-tiba. Kendalikan kendaraan dengan halus dan berikan perhatian lebih terhadap kondisi lalu lintas di depan dengan memberikan jarak aman yang lebih.

Jangan Memaksakan Diri Saat Kondisi Memburuk

Jika hujan abu dan asap semakin pekat hingga jarak pandang sangat terbatas, jangan memaksakan diri untuk terus berkendara. Kurangi kecepatan secara bertahap, nyalakan lampu utama, jaga jarak dengan kendaraan lain, kemudian cari tempat yang aman untuk menepi. Pengendara juga sebaiknya tidak membuka visor helm ketika abu masih pekat.

Perhatikan Kendaraan Setelah Terpapar Abu

Perhatian terhadap kendaraan tidak berhenti setelah sampai di tujuan. Beberapa bagian yang perlu diperhatikan antara lain filter udara, sistem pengereman, rantai dan komponen bergerak, area mesin dan CVT, lampu depan dan belakang, serta ban dan area roda.

Apabila terdapat penurunan performa dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di AHASS terdekat. Pada bagian

bodi, hindari menggosok permukaan kendaraan saat kering.

Bersihkan terlebih dahulu dengan air secara hati-hati untuk mencegah goresan akibat sifat abrasif abu vulkanik. Manager Safety Riding PT Astra Honda Motor (AHM), Daniel Aria Sulisty Nugroho mengatakan pengendara perlu waspada dan tidak memaksakan diri saat terjadi hujan abu vulkanik. Prediksikan bahaya sedini mungkin, sehingga dapat mengantisipasi sebelum bahaya muncul.

"Lakukan persiapan sebelum perjalanan, kurangi kecepatan, jaga jarak aman, perhatikan kondisi jalan, dan segera menepi apabila kondisi sudah tidak memungkinkan untuk berkendara dengan aman. Jika perjalanan tidak mendesak, menunda perjalanan hingga kondisi kembali aman tetap menjadi pilihan terbaik. Tetap Cari Aman saat berkendara," ujar Daniel. (tro)

Kemarau Picu Debu, Dekot Ingatkan Ancaman ISPA



Dokumentasi kegiatan rapat Dekot di Aula III.

(F. ISTIMEWA)

PKK Mitra Strategis Wujudkan Keluarga Sejahtera

GORONTALO - GP- Peningkatan kesejahteraan masyarakat ternyata tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata. Peran organisasi kemasyarakatan, khususnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dinilai sangat menentukan karena bersentuhan langsung dengan keluarga dan lingkungan terkecil di masyarakat.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, Lola Junus, menilai PKK bukan sekadar

organisasi pendamping, melainkan mitra penting pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Menurutnya, keberadaan PKK telah berkontribusi nyata dalam menghimpun potensi warga, menyalurkan aspirasi, hingga menggerakkan masyarakat untuk mandiri.

“Kesuksesan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari peran perempuan dan keluarga. PKK hadir untuk memastikan masyarakat dibina, baik dari sisi kesehatan, pendidikan,

maupun ekonomi. Karena itu, Dekot tentu mendukung setiap langkah PKK,” jelas Lola.

Dukungan DPRD, lanjut legislator Nasdem tidak hanya sebatas pernyataan politik, tetapi juga melalui alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan PKK di lapangan.

Ia menekankan bahwa PKK perlu terus diberdayakan agar program-program pemberdayaan keluarga dapat menjangkau masyarakat secara luas.

“Kesuksesan seorang suami dalam karier maupun pengabdian, ada dorongan besar dari istri. Karena itu, kami ingin menunjukkan bahwa DPRD berdiri mendukung PKK, termasuk dari perspektif keluarga,” ujarnya.

Melalui dukungan tersebut, Dekot berharap PKK semakin kuat sebagai garda terdepan dalam membentuk keluarga sejahtera yang sehat, cerdas, dan produktif sebuah pondasi penting bagi pembangunan Kota Gorontalo. (Adv)

Pemerintah Diminta Perkuat Mitigasi Kekeringan dan Karhutla

GORONTALO - GP- Musim kemarau yang melanda Gorontalo mulai memunculkan sejumlah dampak yang perlu diwaspadai. Selain berkurangnya ketersediaan air bersih, kondisi cuaca kering berpotensi meningkatkan paparan debu dan kabut asap akibat kebakaran lahan.

Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama gangguan pada sistem pernapasan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, Heriyanto Thalib, meminta pemerintah daerah tidak menunggu hingga dampak kemarau semakin meluas. Menurutnya, langkah antisipasi harus disiapkan sejak awal untuk menghadapi berbagai persoalan yang muncul selama musim kering.

“Ketersediaan air bersih, kondisi lahan pertanian, dan stabilitas pangan harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah,” kata Heriyanto.

Ia menjelaskan, kemarau tidak hanya berkaitan dengan cuaca panas dan kekeringan. Tanah yang semakin kering dapat meningkatkan paparan debu. Sementara kebakaran lahan berpotensi menghasilkan asap yang menurunkan kualitas udara.

Jika berlangsung dalam waktu lama, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan.

Kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia juga perlu mendapat perhatian lebih. Begitu pula masyarakat yang sensitif terhadap gangguan pernapasan.

Salah satu ancaman yang perlu diwaspadai adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Paparan debu dan asap dapat mengiritasi saluran



Heriyanto Thalib

pernapasan dan memicu keluhan seperti batuk, iritasi tenggorokan hingga sesak napas pada sebagian orang.

Karena itu, Heriyanto mendorong pemerintah daerah memperkuat mitigasi agar dampak kemarau tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Menurutnya, upaya tersebut tidak cukup hanya dengan memastikan distribusi air bersih bagi wilayah yang mengalami kekurangan. Pengawasan terhadap potensi kebakaran lahan dan upaya menjaga kualitas udara juga perlu diperkuat.

Sektor pertanian, lanjutnya, juga harus menjadi perhatian. Kekurangan air selama musim kemarau dapat memengaruhi produktivitas lahan dan berujung pada terganggunya ketersediaan pangan.

“Koordinasi lintas sektor penting dilakukan. Masyarakat harus tetap mendapatkan akses air bersih, petani mendapat dukungan menghadapi kekeringan, dan potensi kebakaran lahan bisa ditekan,” ujarnya.

Di sisi lain, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi lingkungan. Aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi ketika udara dipenuhi debu atau asap. Penggunaan masker juga diperlukan dalam kondisi tertentu untuk mengurangi paparan.

Dengan antisipasi sejak dini, dampak musim kemarau terhadap kesehatan, lingkungan, pertanian hingga ketahanan pangan di Gorontalo diharapkan dapat diminimalkan. (Adv)

Dekot Desak Ketegasan Pemkot Tertibkan Developer Nakal

GORONTALO-GP- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo menyoroti masih lemahnya pemenuhan kewajiban fasilitas umum oleh sejumlah developer perumahan. Kondisi ini dinilai berpotensi merugikan masyarakat sekaligus membebani keuangan daerah di masa mendatang.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, Herman Haluti, mengungkapkan masih banyak kawasan perumahan yang belum dilengkapi fasilitas dasar secara memadai.

“Fasilitas seperti jalan lingkungan, drainase, tempat pembuangan sampah, hingga

ruang terbuka hijau dan sarana ibadah masih belum terpenuhi di beberapa perumahan,” ujar Herman.

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) harus bersikap tegas terhadap developer yang tidak menjalankan kewajiban. Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah menahan atau tidak memberikan izin pembangunan lanjutan bagi pengembang yang belum memenuhi fasilitas umum. Menurut Herman, ketegasan ini penting untuk memberikan efek jera, sekaligus memastikan hak-hak masyarakat sebagai

konsumen tetap terlindungi. Ia juga mengingatkan, persoalan ini harus diselesaikan sebelum seluruh unit perumahan habis terjual.

“Kalau dibiarkan sampai unit terjual habis, biasanya developer tidak lagi bertanggung jawab. Akhirnya masyarakat mengadu ke pemerintah daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Herman menilai kondisi tersebut dapat berdampak pada anggaran daerah. Pemerintah berpotensi harus turun tangan memperbaiki atau menyediakan fasilitas yang semestinya menjadi tanggung jawab developer. Padahal, kata Herman, penyediaan fasilitas

umum sudah termasuk dalam komponen harga jual rumah. Karena itu, pengembang wajib merealisasikannya, bukan justru membebankan kepada pemerintah.

“Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai masyarakat dirugikan dan pemerintah yang akhirnya menanggung beban,” pungkas Aleg Partai Amanat Nasional itu.

Terakhir Dekot berharap adanya pengawasan lebih ketat serta langkah konkret dari pemerintah daerah agar pembangunan perumahan berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Adv)

Berlangganan Koran muali dari

IDR 75.000

SCAN ME

Harian Gorontalo Post Cetak & Digital

Koran Digital

HARIAN GORONTALO POST

ANDA INGIN

Berlangganan Koran Gorontalo Post

atau

KORAN ANDA BELUM DIANTAR AHRI INI

Hubungi : 0812-4470-554

J&T CARGO GORONTALO 007A

100% Dijamin Ekonomis

0853 9448 8783 0822 9309 9280 0821 9588 2277

J&T Cargo Gorontalo Post

KIRIM CEPAT, MURAH & BISA BANYAK

Alamat : Jl. Dr. Jhon Aryo Katili No.144 Kel. Paguyaman Kec.Kota Tengah, Kota Gorontalo

RENUNGAN ROHANI BE RADIO - 94.3 FM SETIAP HARI 08.00 WITA

CITY HARVEST CHURCH INDONESIA - GORONTALO

JL. WOLTER MONGINSIDI
CONTACT PERSON 0435-829392
WHATSAPP : 085256276914
INSTAGRAM/FACEBOOK : C HARVEST GORONTALO
YOUTUBE : CHC INDO GTO

IBADAH RALLY PRAYER SETIAP HARI KAMIS PUKUL 19.30 WITA

IBADAH DOA FAJAR VIA ZOOM MEETING
MEETING ID: 366 681 7318 - PASSCODE: BLESSED
SETIAP HARI JUMAT PUKUL 05.00 WITA

BEFORE BED (DOA SEBELUM BERISTIRAHAT)
VIA ZOOM MEETING ID: 366 681 7318 - PASSCODE: BLESSED
SETIAP HARI SENIN DAN JUMAT PUKUL 21.00 WITA

GEREJA ANAK (CHILDREN'S CHURCH)
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 09.30 WITA

IBADAH RAYA PAGI (LIVE STREAMING VIA YOUTUBE)
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 09.00 WITA

IBADAH RAYA SORE (DI HOTEL ELIZABETH LIMBOTO, SAMPING POLRES)
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 17.00 WITA

IBADAH STAY : STUDENT-TEENAGE-AND-YOUTH
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 17.00 WITA

Antrean Pertalite Meluas Komisi II Minta Ditangani Serius

PUNCAKBOTU-GP- Komisi II Deprov Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta instansi terkait, Selasa (8/9/2026).

RDPU tersebut digelar untuk menyikapi persoalan antrean panjang dan dugaan kelangkaan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Provinsi Gorontalo.

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo itu, anggota dewan menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari distribusi dan kuota BBM, antrean panjang, dugaan pengetapan, penggunaan jeriken, penyalahgunaan barcode, hingga evaluasi surat rekomendasi pembelian BBM bagi petani dan nelayan.

Ketua Komisi II Mikson Yapanto, mengatakan persoalan yang terjadi saat ini tidak semata-mata berkaitan dengan kekurangan stok BBM. Berdasarkan informasi yang diterima, stok BBM disebut masih tersedia, namun terjadi lonjakan kebutuhan masyarakat terhadap Pertalite.

“Terkait dengan bukan kelangkaan, begitu banyaknya antrean di setiap SPBU. Mereka mengatakan antrean bukan persoalan kekurangan stok. Stoknya siap, cuma memang ada lonjakan kebutuhan dari masyarakat terkait Pertalite ini,” ujar Mikson.

Menurutnya, kenaikan harga sejumlah jenis BBM, khususnya Dexlite dan Pertamina, turut mendorong pergeseran konsumen ke Pertalite. Selisih harga yang semakin jauh membuat sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamina beralih menggunakan BBM bersubsidi.

Mikson menilai kondisi tersebut juga dapat memicu masyarakat melakukan pengisian dalam jumlah lebih banyak karena khawatir harga Pertalite ikut mengalami kenaikan.

“Dexlite naik, kemudian Pertamina naik. Otomatis orang yang tadinya beralih ke Pertalite karena selisihnya sudah agak jauh. Yang tadinya mungkin satu hari isinya 30 liter, tentu dia menginginkan 60 liter,” jelasnya. Ia mengatakan, kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan kenaikan harga Pertalite turut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan pemerintah dalam melihat fenomena antrean panjang di SPBU.

“Ini kan kondisi yang perlu kita lihat secara menyeluruh. Jangan sampai masyarakat kemudian membeli lebih banyak karena takut Pertalite ini naik lagi,” tambahnya. (rmb)



RAPAT kerja Komisi II Deprov Gorontalo kemarin



RAPAT paripurna Deprov Gorontalo dengan agenda penetapan rencana induk kerja (RIK) 2027, kemarin (8/9).

PARIPURNA DEPROV GORONTALO

Tetapkan RIK 2027

PUNCAKBOTU -GP- Deprov Gorontalo menetapkan Rencana Induk Kerja (RIK) 2027, melalui Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (8/9/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua Deprov Thomas Mopili, serta dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Sekretariat DPRD, tenaga ahli Fraksi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.

Rapat diawali penyampaian Rencana Kerja DPRD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 oleh Sekretaris Deprov Rifli Katili. Dalam penyampaiannya, Rifli Katili menjelaskan bahwa Rencana Kerja DPRD Tahun 2027 disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD sekaligus menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan terhadap seluruh kegiatan dewan.

“Rencana Kerja DPRD Tahun 2027 ini disusun untuk mematangkan perencanaan kinerja DPRD sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dapat berjalan lebih terarah, efektif dan terukur,” jelasnya.

Penyusunan dokumen tersebut dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo melalui Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Rencana kerja mencakup seluruh alat kelengkapan DPRD, mulai dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Kehormatan, hingga Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV.

Rencana Kerja DPRD Tahun 2027 juga mengakomodasi tiga fungsi utama DPRD,

yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Dalam fungsi pembentukan peraturan daerah, DPRD akan melaksanakan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) bersama Gubernur, pembahasan rancangan Perda serta pengajuan usul rancangan Perda.

Sementara fungsi anggaran diwujudkan melalui pembahasan dan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD, termasuk pembahasan KUA-PPAS, APBD, perubahan APBD hingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Adapun fungsi pengawasan diarahkan pada pengawasan pelaksanaan Perda, peraturan Gubernur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan juga mencakup tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan serta dapat dilaksanakan melalui rapat kerja komisi, rapat dengar pendapat umum dan penyerapan pengaduan masyarakat.

Sepanjang 2027, agenda DPRD akan mencakup rapat paripurna, rapat Badan Musyawarah, rapat pimpinan, rapat konsultasi, rapat komisi, rapat Badan Anggaran, rapat Badan Kehormatan, rapat Bapemperda, rapat gabungan komisi hingga rapat panitia khusus.

Rencana Kerja DPRD Tahun 2027 dibagi dalam tiga masa persidangan. Setiap masa persidangan disertai agenda reses pada akhir masa sidang, dengan ketentuan khusus untuk masa sidang pada akhir masa jabatan.

Sejumlah alat kelengkapan DPRD juga telah menyusun agenda kerja masing-masing. Badan Musyawarah, misalnya, memiliki tugas menyusun, mengkaji dan merumuskan agenda kerja DPRD, termasuk membahas perubahan agenda serta menetapkannya melalui rapat paripurna.

Di bidang ekonomi dan keuangan, Komisi II merencanakan berbagai agenda berupa rapat kerja, rapat dengar pendapat, Komisi II juga memasukkan agenda pengusulan dua rancangan Perda inisiatif serta pelaksanaan reses.

Sementara itu, Komisi IV yang membidangi Kesejahteraan Sosial dan Iptek merencanakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, termasuk satu rancangan Perda usul inisiatif serta agenda reses.

Untuk bidang legislasi, Bapemperda menempatkan pembentukan produk hukum daerah dan pembahasan rancangan Perda sebagai salah satu agenda penting dalam Rencana Kerja DPRD Tahun 2027.

Ketua Deprov Thomas Mopili menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD serta alat kelengkapan dewan yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo memiliki instrumen perencanaan sekaligus evaluasi pelaksanaan kerja alat kelengkapan DPRD untuk Tahun Anggaran 2027. Dokumen tersebut juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. (rmb)

PENDIDIKAN

Kontingen Gorontalo Batal Berangkat

Erupsi Gunung Anak Krakatau, O2SN Diksus 2026 Ditunda

GORONTALO-GP- Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang Pendidikan Khusus (Diksus) Tahun 2026 resmi ditunda. Keputusan tersebut diambil Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dengan mempertimbangkan kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau yang berpotensi mengganggu keselamatan dan perjalanan peserta.

O2SN Diksus yang semula dijadwalkan berlangsung pada 7-12 September 2026 ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Keputusan itu tertuang dalam surat Puspresnas Nomor 1933/B/H3/PN.00/2026 tertanggal 6 September 2026.

Penundaan dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Kementerian Perhubungan terkait perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kondisi tersebut turut berdampak pada mobilisasi peserta dari berbagai daerah. Sebaran abu vulkanik menyebabkan kualitas udara menurun dan mengganggu operasional transportasi, termasuk penerbangan.

Berdasarkan informasi BNPB pada 6 September 2026, sejumlah bandara sempat mengalami penutupan sementara. Di antaranya Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Radin Inten II Lampung, dan Budiarto Curug.

Situasi itu dinilai berpotensi menghambat perjalanan atlet, pendamping, pelatih, juri maupun

panitia menuju lokasi pelaksanaan O2SN Diksus. Sementara itu, kontingen Provinsi Gorontalo sebenarnya telah dipersiapkan untuk mengikuti ajang tingkat nasional tersebut.

Kontingen Gorontalo berjumlah 11 orang. Terdiri dari satu ketua kontingen, lima atlet dan lima pendamping.

Bahkan, pada pagi hari sebelum keputusan penundaan diterima, seluruh kontingen telah bersiap menuju bandara. Sejumlah peserta dari Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara bahkan telah dalam perjalanan menuju lokasi keberangkatan. Namun, ketika perjalanan berlangsung, informasi mengenai penundaan resmi diterima. Rencana keberangkatan pun akhirnya dibatalkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Sudarman Samad, mengatakan keselamatan peserta

menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kegiatan nasional tersebut. “Penundaan ini tentu perlu kita sikapi dengan bijak. Keselamatan dan kenyamanan peserta, terutama anak-anak berkebutuhan khusus, harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Sudarman mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan penyelenggara dan tetap mempersiapkan kontingen untuk mengikuti O2SN setelah jadwal baru ditetapkan. “Kami akan mengikuti arahan resmi penyelenggara dan mempersiapkan kontingen untuk pelaksanaan pada waktu yang ditetapkan kemudian,” lanjutnya.

Ketua Tim Kerja Peserta Didik SMA dan Diksus, Affandi Lakoro, juga meminta kontingen memanfaatkan masa penundaan untuk meningkatkan kesiapan. Menurutnya, penundaan dapat menjadi kesempatan bagi atlet

untuk memantapkan latihan sebelum kembali berlaga di tingkat nasional.

“Penundaan ini bisa kita ambil sisi positifnya, memberi kesempatan pada kontingen untuk lebih memantapkan latihan pada pelaksanaan O2SN Diksus yang akan diselenggarakan oleh Puspresnas untuk hasil yang lebih baik,” kata Affandi.

Saat ini, seluruh kontingen masih menunggu pemberitahuan resmi terkait jadwal pengganti. Puspresnas mengimbau peserta dan pendamping tidak melakukan perjalanan menuju lokasi sebelum ada informasi resmi mengenai pelaksanaan selanjutnya.

Bagi kontingen Gorontalo, masa penundaan akan dimanfaatkan untuk menjaga kondisi atlet dan melanjutkan persiapan. Dengan begitu, kontingen diharapkan tetap siap ketika jadwal baru O2SN Diksus ditetapkan. (Tr-76)

Timnas Basket Pertama Datang ke Asian Games 2026

TIMNAS basket putra Indonesia jadi rombongan pertama kontingen Merah Putih terbang ke Nagoya untuk Asian Games 2026. Semoga jadi awal yang baik! Timnas basket bertolak ke Nagoya pada Senin (7/9) malam. Mereka terbang dari Surabaya kemudian transit di Singapura, lalu ke Nagoya, Jepang. Yudha Saputra dkk berangkat lebih awal karena pertandingan pertama



penyisihan grup akan dimulai Kamis (10/9). Sementara pembukaan Asian Games berlangsung 19 September. Sebab jadi kontingen pertama yang bertanding membuat CdM Indonesia Todotua Pasaribu punya harapan khusus. "Harapannya, tim basket kita bisa menjadi endorsement yang positif. Jadi ketika pembukaan, kita yakin dan percaya tim basket kita sudah bisa memberikan yang terbaik, sehingga pada saat pembukaan Asian Games pun kita sudah

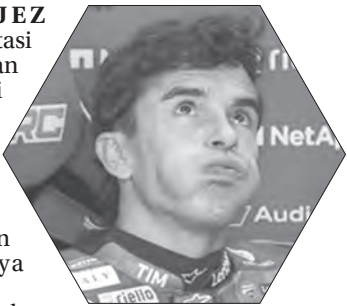
punya kabar yang baik," kata CdM Indonesia Todotua Pasaribu kepada wartawan saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan. Menurutnya ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan betul bagi Timnas. Apalagi lolosnya basket Indonesia ke Asian Games setelah ada slot terbuka. "Ini rombongan yang pertama. Walaupun memang ini adalah slot yang bisa kita masuk, tapi dari CdM sendiri, kami, sudah sekitar dua atau tiga kali melihat tim ini. Kebetulan saya juga bagian dari keluarga besar Perbasi," tuturnya. Timnas basket Indonesia sendiri dikabarkan sudah tiba di Nagoya pada Selasa (8/9). **(net)**



Dokter: Kekuatan Lengan Tinggal 50 Persen

Marc Marquez Pensiu?

MARC MARQUEZ masih harus beradaptasi dengan kondisi lengan kanan yang jauh dari normal. Dokter yang pernah mengoperasikannya, Samuel Antuna, mengungkapkan kekuatan lengan tersebut kini hanya sekitar 50 persen.



Antuñia menjelaskan kondisi itu merupakan dampak dari berbagai cedera dan operasi yang dijalani Marc. Kecelakaan di MotoGP Indonesia tahun lalu menjadi titik balik karena kembali memperburuk kondisi lengan kanannya. "Sebelum kecelakaan di Indonesia, dia baik-baik saja. Dia bisa balapan, tidak merasakan sakit dan tidak mengeluhkan apa pun. Kecelakaan itu mengubah semuanya," kata Antuna kepada El Periodico yang dilansir Motosan. Masalah Marc kemudian semakin rumit karena saraf radial di lengannya sempat tertekan serpihan tulang. Kondisi itu membuatnya kehilangan kendali atas lengan saat berada dalam posisi tertentu di atas motor dan berkontribusi terhadap sejumlah kecelakaan. Setelah menjalani operasi untuk mengatasi masalah tersebut, kondisinya membaik. Namun, kekuatan lengan kanannya tetap jauh di bawah lengan kiri. "Dia memiliki latissimus dorsi yang kuat, tetapi secara mekanis terganggu. Hal yang sama berlaku pada teres major. Namun, masalah utamanya adalah dia kehilangan kekuatan pada bicep," ujar Antuna. **(net)**

Tennis Championship Rafalentino/Ethan Gagal Juara



PUPUS sudah harapan Indonesia berjaya di Men's World Tennis Championship 2026. Ini setelah Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp kalah di final. Pada pertandingan puncak ganda putra Seri IV ITF World Tennis Tour M-1 di Lapangan A, Bali Beach Country, Nusa Dua, Senin (7/9), Rafalentino/Ethan harus mengakui ketangguhan Alexander Chang/Pablo Perez Ramos. Di set pertama, Rafalentino/Ethan mengalami kesulitan mengimbangi permainan Alexander/Pablo. Petenis Amerika Serikat/Spanyol itu langsung menyerang lewat servis voli sebelum menang 6-3. Memasuki set kedua, ganda tuan rumah yang sempat menyingkirkan unggulan pertma Isaac Becroft/Reece Falch bisa bangkit untuk memberikan perlawanan hingga game ke-10 untuk membuat skor sama kuat 5-5. Namun, keunggulan pengalaman dari Alexander/Pablo dalam hal mematahkan servis lawan membuat mereka menang 7-5 dalam tempo 1 jam 11 menit untuk keluar sebagai juara. Meski menang, Pablo memuji permainan dari Rafalentino dan Ethan yang nyaris membuatnya kesulitan diset kedua. "Kami bersyukur bisa menang karena lawan (Rafalentino dan Ethan) tampil luar biasa sehingga menyulitkan kami." **(net)**

Derrick Michael

Wujudkan Mimpi Masa Kecil Tampil di Asian Games

MATA Derrick Michael Xzavierro berbinar saat berbicara soal Asian Games 2026. Dia akan mewujudkan mimpi masa kecilnya! "Aku ingat terakhir kali menonton Asian Games itu saat digelar di Jakarta. Asian Games di Jakarta benar-benar seperti mimpi buat aku. Waktu itu aku masih SMA dan datang ke Gelora Bung Karno hanya untuk menonton. Suasanaanya benar-benar bagus, begitu juga dengan penontonnya," kata Derrick saat ditemui di Jakarta Selatan, Sabtu (6/9).

Tak ayal, saat mimpi itu terwujud, Derrick mengaku benar-benar antusias. Apalagi klub tempat ia bernaung saat ini, Saga Ballooners, mengizinkannya memperkuat Indonesia. "Aku antusias banget karena ini pertama kalinya

aku tampil di Asian Games," ujarnya. "Ini juga merupakan salah satu impianku sejak kecil untuk bisa bermain di Asian Games. Jadi, aku ingin membuat semuanya benar-benar berarti." Di Asian Games, Derrick dan kawan-kawan langsung menghadapi tantangan besar. Ia akan melawan tuan rumah di Aichi-Nagoya pada 10 September 2026. Alih-alih gentar, Derrick justru makin semangat. Apalagi, Derrick sudah terbiasa dengan atmosfer basket Jepang. Kini ia akan merasakannya dengan jersey Merah Putih. "Kami akan bermain melawan Jepang. Aku tahu arenanya akan sangat besar, salah satu arena terbesar di B.League. Jadi, aku sangat excited untuk bermain di sana," ujarnya. **(net)**



LIGA CHAMPIONS 2026/2027

4 DEBUTAN LANGSUNG DIUJI RAKSASA EROPA!

Empat klub akan menjalani debut di fase liga Liga Champions 2026/2027. Mereka adalah Como, LASK, Sabah, dan Viking. Lawan-lawan berat sudah menanti. Dalam debutnya, mereka langsung mendapat tantangan berat. Keempatnya mendapatkan lawan-lawan berpengalaman di Eropa, termasuk klub-klub yang pernah mengangkat trofi Piala/Liga Champions. Como akan berhadapan dengan Manchester United, Paris Saint-Germain, dan Barcelona. Viking mendapat tantangan menghadapi empat mantan juara Eropa dalam satu fase liga.

■ COMO HADAPI MU, PSG, DAN BARCELONA

Como menjadi salah satu debutan yang mendapatkan undian menarik. Klub Italia itu akan menjamu RB Leipzig, Manchester United, AEK Athens, dan PSG. Mereka juga bertandang ke markas Feyenoord, Lens, Real Betis, dan Barcelona.

Pertemuan dengan MU dijadwalkan pada Matchday 3, saat Como menjadi tuan rumah. PSG kemudian datang pada Matchday 7. Barcelona menjadi lawan Como pada laga terakhir fase liga di Matchday 8. Artinya, Como akan menghadapi tiga klub

besar Eropa yang punya sejarah panjang di Liga Champions. Barcelona, MU, dan PSG merupakan nama-nama yang sudah sangat akrab dengan panggung elite Eropa. Como sendiri masuk fase liga setelah finis di posisi keempat Serie A 2025/2026. Ini menjadi penampilan pertama mereka di kompetisi Eropa. Como juga menjadi satu-satunya dari empat debutan musim ini yang lolos langsung ke fase liga tanpa melalui babak kualifikasi.

■ VIKING HADAPI 4 JUARA EROPA

Kalau berbicara soal jumlah mantan juara Eropa yang dihadapi, Viking juga punya tantangan berat. Empat tim yang pernah menjuarai Liga Champions masuk jajaran tim lawan. Klub Norwegia itu akan bertemu Bayern Munich, Aston Villa, Feyenoord, dan PSV. Keempatnya pernah menjuarai ajang yang dulunya juga punya nama European Cup itu, sebelum berganti nama menjadi Liga



Champions sejak 1992. Viking akan menjamu Bayern, Feyenoord, PSV, dan Sabah. Mereka kemudian bertandang ke markas Stuttgart, Aston Villa, Atletico Madrid, dan Napoli. Viking lolos ke fase liga setelah menyingkirkan GNK Dinamo pada babak play-off. Mereka menang 3-1 pada leg kedua dan melaju dengan agregat 5-3. Ini menjadi kali pertama Viking tampil di fase utama Liga Champions. Sebelumnya, mereka pernah tampil di fase grup Piala UEFA 2005/2006. Menariknya, Viking dan Sabah juga akan bertemu langsung. Duel sesama debutan tersebut berlangsung di Stavanger pada Matchday 4.

■ SABAH LANGSUNG KETEMU MU, DORTMUND, BARCELONA

Sabah juga langsung mendapat pengalaman besar dalam debutnya. Klub Azerbaijan itu memastikan tiket ke fase liga setelah melewati babak play-off. Sabah akan menghadapi Manchester United, Slavia Praha,

Borussia Dortmund, Viking, Barcelona, Villarreal, Napoli, dan Arsenal. Di Matchday 1, Sabah harus melawat ke Old Trafford untuk menghadapi Manchester United. Setelah itu, Slavia Praha dan Dortmund bertamu ke markas Sabah pada Matchday 2 dan 3. Pada Matchday 4, Sabah berduel dengan sesama debutan, Viking. Setelah laga tandang itu, Sabah menjamu Barcelona pada Matchday 5. Klub Spanyol lain, Villarreal, dihadapi Sabah pada Matchday 7, sebelum fase liga ditutup dengan lawatan ke markas Arsenal pada Matchday 8.

■ LASK DAPAT LIVERPOOL, MADRID, DAN PORTO

LASK juga langsung menghadapi nama-nama besar Eropa dalam debutnya di fase liga Liga Champions. Klub Austria tersebut akan bertemu Liverpool, Sporting CP, Slovan Bratislava, Bodo/Glimt, Fenerbahce, Real Madrid, dan Porto, selain AEK Athens pada laga pembuka. LASK menjamu Liverpool pada Matchday 2, Slovan Bratislava pada Matchday 4, Fenerbahce pada Matchday 6, dan Porto pada Matchday 8. Mereka harus bertemu ke markas AEK Athens, Sporting CP, Bodo/Glimt, dan Real Madrid. **(net)**

Mengukur Sisa Waktu Kepala Daerah

KEPALA daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025 secara formal masih mempunyai masa jabatan sampai 20 Februari 2030. Per 8 September 2026, sebanyak 565 hari telah berlalu dan masih tersisa 1.261 hari kalender, atau sekitar tiga tahun lima bulan. Setelah Sabtu, Minggu, dan perkiraan hari libur dikeluarkan, waktu yang benar-benar tersedia untuk bekerja berada di kisaran 860 hari. Angka itu terlihat masih besar, tetapi keadaan sebenarnya tidak sepanjangyangditunjukkankalender. Pemerintahan harus mengejar target pembangunan, menyelesaikan program, menjaga anggaran tetap sehat, mengendalikan birokrasi, merawat hubungan dengan DPRD dan partai pengusung, menghadapi kritik publik, serta segera berhadapan dengan meningkatnya kegiatan politik menuju 2029. Jika semua itu dimasukkan dalam hitungan, kepala daerah sebenarnya sedang memasuki masa ketika setiap tahun yang terbuang akan sangat sulit diganti.

APBD 2027 Sebagai Titik Penetu
Hampir sepertiga masa jabatan telah berlalu sehingga ukuran terhadap kepala daerah semestinya mulai berubah. Publik tidak lagi cukup disuguhi rencana, kunjungan, rapat, penyerahan bantuan, atau peresmian kegiatan. Yang harus mulai diperlihatkan adalah apakah pertumbuhan ekonomi membaik, kemiskinan dan pengangguran turun, investasi bergerak, layanan kesehatan dan pendidikan meningkat, infrastruktur selesai, pendapatan daerah menguat, serta target dalam RPJMD bergerak sesuai rencana. Di sinilah 2027 mempunyai posisi yang sangat menentukan. Pemerintah sudah melewati masa penyesuaian, kepala daerah telah mengenal kemampuan birokrasi, dan program utama semestinya sudah mempunyai dukungan anggaran yang cukup. Jika sampai akhir 2027 pemerintah masih menjelaskan apa yang hendak dilakukan, bukan apa yang sudah dihasilkan, persoalannya bukan lagi kekurangan waktu untuk menyesuaikan diri. Siklus APBD membuat persoalan itu semakin jelas. APBD 2025 pada dasarnya masih merupakan anggaran transisi karena telah ditetapkan sebelum kepala daerah baru dilantik, sedangkan

APBD 2026 mulai mencerminkan pilihan pemerintahan baru. Dengan demikian, APBD 2026, 2027, dan 2028 merupakan tiga kesempatan anggaran yang paling menentukan apakah satu periode pemerintahan akan meninggalkan hasil atau sekadar meninggalkan daftar program. APBD 2027 seharusnya menjadi anggaran untuk mempercepat pekerjaan, sedangkan APBD 2028 sudah harus diarahkan pada penyelesaian dan pencapaian target. Memulai terlalu banyak proyek besar pada 2028 mengandung risiko karena waktu untuk menghadapi keterlambatan, perubahan anggaran, masalah pengadaan, pembebasan lahan, atau hambatan administratif semakin pendek. Pemerintah yang memasuki 2029 dengan banyak proyek besar yang belum selesai sebenarnya sedang membawa masalah lama ke tahun ketika ruang politik justru semakin sempit.

Karena itu, penyerapan anggaran juga tidak boleh menjadi tempat berlindung. Anggaran yang terserap tinggi tidak banyak berarti jika indikator pembangunan tidak berubah, proyek tidak selesai, dan pelayanan publik tidak membaik. Pemerintah daerah harus dinilai dari hubungan yang masuk akal antara uang yang dibelanjakan, pekerjaan yang diselesaikan, dan perubahan yang diterima masyarakat.

Pembelahan Birokrasi : “Hanya Berkumpul, Belum Berbaris dan Banyak Matahari”

Ancaman terhadap keberhasilan kepala daerah tidak selalu datang dari luar pemerintahan. Masalah yang lebih berbahaya justru dapat tumbuh dari dalam ketika birokrasi terlihat berkumpul, tetapi sebenarnya tidak berbaris. Semua hadir dalam rapat, semua mengangguk ketika instruksi diberikan, tetapi pelaksanaan di lapangan berjalan lambat atau bahkan tidak bergerak. Keadaan seperti itu biasanya muncul ketika birokrasi membaca adanya pembelahan kekuasaan. Ada pejabat yang lebih dekat kepada kepala daerah, ada yang merasa berada dalam pengaruh wakil kepala daerah, ada yang menjaga hubungan dengan partai tertentu, dan ada pula yang menunggu arah politik berikutnya. Pemerintahan kemudian mempunyai terlalu banyak pusat pengaruh, padahal garis komando



Oleh :
Dr. Funco Tanipu., ST., M.A

pemerintahan harus jelas.

Dalam bahasa sederhana, terlalu banyak ‘matahari’ membuat birokrasi kehilangan arah. Kepala daerah memberi perintah, tetapi aparaturnya masih melihat ke tempat lain sebelum bergerak, sementara keputusan kepala daerah diterjemahkan menurut kedekatan dan kepentingan masing-masing. Jika keadaan seperti ini dibiarkan, kepala daerah secara formal memimpin pemerintahan tetapi tidak sepenuhnya mengendalikan mesin pemerintahannya sendiri. Hubungan dengan wakil kepala daerah menjadi penting dalam keadaan tersebut. Perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang biasa, tetapi persaingan terbuka antara kepala dan wakil dapat melahirkan pembelahan sampai ke organisasi perangkat daerah. Ketika pejabat mulai merasa harus memilih berada di belakang siapa, kualitas pemerintahan akan kalah oleh urusan loyalitas. Masalah menjadi lebih besar jika pada saat yang sama hubungan dengan partai pengusung juga renggang. Kepala daerah membutuhkan dukungan politik untuk menjaga hubungan dengan DPRD, membahas anggaran, mempertahankan program, dan menyelesaikan persoalan yang membutuhkan keputusan politik. Jika partai pengusung mulai mengambil jarak, wakil kepala daerah bergerak sendiri, sementara birokrasi tidak lagi berada dalam satu komando, energi yang seharusnya digunakan mengejar target pembangunan akan habis untuk mengurus keseimbangan kekuasaan. Demonstrasi yang terus muncul menambah tekanan dari luar. Demonstrasi tentu tidak otomatis berarti pemerintah gagal, tetapi

protes yang berkali-kali muncul karena persoalan yang sama patut dibaca sebagai tanda adanya masalah yang tidak terselesaikan. Pemerintah yang terlalu sering sibuk menjawab kritik, tetapi lambat menghilangkan sumber kritik, sedang kehilangan dua hal sekaligus: kepercayaan dan waktu.

Karenaitu, kemampuan memimpin birokrasi harus dimasukkan sebagai ukuran keberhasilan kepala daerah. Seorang kepala daerah dapat mempunyai program yang baik dan APBD yang cukup, tetapi semuanya tidak banyak berarti jika instruksi tidak berjalan sampai ke bawah. Pemerintahan bukan hanya persoalan memiliki gagasan, melainkan kemampuan membuat seluruh perangkat bergerak menuju sasaran yang sama.

Jika Gagal, Apa yang Tersisa?

Tekanan berikutnya datang dari politik. Memasuki 2028, partai mulai mempersiapkan Pemilu 2029, anggota DPRD mulai menghitung peluang masing-masing, dan banyak elite daerah mulai memikirkan posisi politik berikutnya. Pemerintahan tetap berjalan, tetapi kepala daerah tidak bekerja di ruang yang bebas dari kepentingan elektoral.

Keadaan menjadi lebih rumit bagi kepala daerah yang mempunyai sasaran politik pada 2029. Keinginan menuju DPR, DPD, posisi dalam partai, atau arena politik nasional tentu merupakan hak politik, tetapi waktu untuk mengejar jabatan berikutnya adalah waktu yang diambil dari periode pemerintahan yang sedang dijalankan. Publik berhak mempertanyakan apakah perjalanan, keputusan, hubungan politik, bahkan penempatan pejabat masih diarahkan terutama untuk menyelesaikan urusan pemerintahan atau mulai menjadi investasi untuk kepentingan politik berikutnya. Bagi kepala daerah yang periode sekarang merupakan periode terakhir, masalahnya bahkan lebih keras. Jika sampai 2028 tidak ada capaian yang cukup kuat, ia akan meninggalkan jabatan tanpa warisan pemerintahan yang dapat menjadi modal menuju posisi politik yang lebih tinggi. Ambisi politik setelah 2030 akan sulit dijual jika masyarakat tidak dapat menunjuk pekerjaan penting apa yang benar-benar selesai selama ia memimpin. Bagi kepala daerah

yang masih mempunyai peluang mencalonkan diri lagi pada pemilu daerah berikutnya, persoalannya tidak lebih ringan. Putusan Mahkamah Konstitusi mengatur pemilu daerah dilaksanakan paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan hasil Pemilu nasional, meskipun pengaturan transisinya masih memerlukan tindak lanjut bentuk undang-undang. Artinya, siapa pun yang ingin kembali meminta mandat kepada pemilih akan membawa rekam jejak periode sekarang sebagai modal utama.

Sulit meminta masyarakat memberikan kesempatan kedua jika kesempatan pertama tidak menghasilkan sesuatu yang dapat diingat. Jika program unggulan tidak berjalan, indikator pembangunan tidak banyak berubah, proyek penting tersendat, birokrasi terbelah, dan hubungan politik terus gaduh, kampanye berikutnya akan berhadapan dengan pertanyaan yang sangat sederhana: apa yang sudah dikerjakan ketika kekuasaan masih berada di tangan? Janji baru akan kehilangan daya ketika janji lama belum dapat diperlihatkan hasilnya. Itulah sebabnya 2027 dan 2028 menjadi dua tahun yang sangat menentukan. Kepala daerah yang berhasil menggunakan dua tahun itu masih mempunyai kesempatan memasuki tahun politik dengan hasil pembangunan, birokrasi yang terkendali, serta modal kepercayaan yang cukup. Sebaliknya, kepala daerah yang membiarkan dua tahun itu berlalu dalam konflik, pergantian pejabat, rapat tanpa pelaksanaan, proyek yang tersendat, dan konsolidasi politik akan memasuki 2029 dalam keadaan defensif. Pada akhirnya, persoalan terbesar kepala daerah bukan semata-mata sedikitnya waktu yang tersisa. Persoalannya adalah apakah kekuasaan yang masih ada benar-benar dapat digerakkan, apakah birokrasi masih patuh pada satu garis pemerintahan, dan apakah anggaran masih bisa diubah menjadi hasil. Jika tiga hal itu tidak segera beres, masa jabatan mungkin baru berakhir pada 2030, tetapi pemerintahan dapat kehilangan momentumnya jauh sebelum itu. (*)

Penulis adalah pengajar di Universitas Negeri Gorontalo

Menangkap Momentum RUU Masyarakat Adat

RIAK gejala politik lokal mulai dari wacana negara federal hingga suara-suara yang menyerukan referendum di tengah masyarakat Maluku Utara sejatinya lahir dari akumulasi rasa kecewa yang mendalam. Berbagai laporan media massa nasional maupun lokal belakangan ini secara luas merekam kegelisahan publik: mulai dari maraknya pengerukan sumber daya alam dan kerusakan hutan, ketimpangan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan, beban utang, hingga persoalan penegakan hukum dan korupsi. Warga membaca adanya ketidakadilan saat kekayaan alam daerah dikeruk, sementara ruang hidup masyarakat adat terancam. Namun, merespons kegelisahan tersebut dengan wacana federalisme atau referendum bukanlah langkah yang realistis secara tata negara. Energi besar masyarakat ini akan jauh lebih berdampak jika kita salurkan bersama ke dalam jalur konstitusi yang nyata dan sedang terbuka lebar di depan mata.

Momentum Emas di DPR RI
Saat ini, DPR RI di Jakarta sedang bergerak cepat dalam membahas dan menggodok Rancangan Undang-

Undang (RUU) Masyarakat Adat. Bagi kita yang berada di daerah, langkah politik di pusat ini bukanlah sekadar berita angin lalu, melainkan sebuah alarm sekaligus momentum emas yang patut kita tangkap bersama. Jika seluruh elemen di daerah” baik pemerintah, DPRD, akademisi, hingga perangkat adat bergerak menyatukan langkah dan menyusun draf usulan resmi, kita dapat memastikan masa depan wilayah kita terlindungi dengan kuat.

Peluang Legal dalam Konstitusi
Momentum pembahasan RUU di DPR RI ini sejatinya adalah pintu masuk yang paling tepat bagi Maluku Utara untuk memperjuangkan status Daerah Otonomi Khusus (Otsus) atau Desentralisasi Asimetris. Kita perlu melihat realitas hari ini secara bijak:

Karakteristik wilayah kepulauan kita membutuhkan payung hukum yang jauh lebih kuat dan spesifik daripada sekadar otonomi daerah reguler. Kita membutuhkan aturan khusus untuk membentengi tanah ulayat, wilayah laut, serta kekayaan pertambangan kita, terutama di Halmahera dan pulau-pulau

Oleh :
Syamsu Djalal

sekitarnya agar tidak mudah didikte oleh kepentingan modal asing dan ekspansi korporasi global. Peluang kita untuk menyuarakan hak khusus ini sangat terbuka lebar dan sah secara konstitusional melalui Pasal 18B UUD 1945. Landasan ini diperdalam oleh pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengenai Desentralisasi Asimetris, serta diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat adalah milik masyarakat adat, bukan milik negara. Dengan modal hukum dan momentum politik ini, alangkah baiknya jika seluruh pemangku kebijakan di daerah dapat bersatu menyusun draf perjuangan ini. Dua Langkah Strategis untuk Daerah Peluang emas dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat di DPR RI, kini saatnya bagi kita semua di daerah untuk merumuskan langkah-langkah strategis. Dari pada menghabiskan energi pada tuntutan bentuk negara yang buntu secara hukum, kita bisa bersama-sama mengusulkan penguatan hak Otonomi Khusus Provinsi Maluku Utara melalui

dua poin penting: Pertama, mengusulkan penyesuaian nama provinsi menggunakan nama asli yang berbasis pada akar sejarah dan identitas kultural wilayah, bukan lagi sekadar penamaan arah mata angin (“Utara”). Penyesuaian identitas ini memperkuat posisi wilayah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dilindungi konstitusi. Kedua, mempertegas dan mengunci kedudukan ibu kota provinsi agar tetap melekat secara sah di dalam wilayah hukum dan kedaulatan Tidore Kepulauan, yang secara administratif berkedudukan di Sofifi. Penegasan ini memastikan Sofifi berdiri kokoh di bawah naungan sejarahnya sebagai jantung komando kebijakan Poros Sultan Nuku dan Sultan Zainal Abidin. Benteng Perlindungan Rakyat dan Adat Melalui payung hukum Otonomi Khusus ini, pengelolaan laut, wilayah tata ruang, dan perizinan investasi pertambangan wajib melewati pintu perlindungan hukum yang menghormati hak-hak masyarakat setempat. Sistem ini menjadi benteng bagi daerah dalam menghadapi tekanan modal korporasi global, sekaligus menutup celah terjadinya negosiasi sepihak

yang sering merugikan masyarakat di tingkat bawah. Merawat Persatuan dan Marwah Sejarah Kita menyadari bahwa batas administratif provinsi hari ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan bentang sejarah masa lalu.

Pilar sejarah Tidore memiliki jangkauan persaudaraan luhur yang melintasi batas administrasi modern merangkul ikatan kultural dari Maluku Utara, Maluku, hingga ke bentang wilayah Gamsio Papoua. Oleh karena itu, perjuangan Otonomi Khusus Maluku Utara ini bertujuan untuk menghormati, menjaga, dan menegakkan kembali keagungan warisan sejarah persatuan kemaritiman yang pernah ada. Dengan menjaga rasa saling menghormati di antara seluruh pemangku adat dan merangkul segenap warga, mari kita satukan naskah pemikiran ini. Pemerintah Daerah, DPRD, pihak Kesultanan, dan seluruh elemen masyarakat dapat melangkah bersama membawa usulan ini ke Jakarta selagi momentum pembahasan regulasi di DPR RI masih terbuka. (*)

Penulis adalah Pencinta sejarah dan kebudayaan Tidore

Seriusi Pelaksanaan Progra

Dengan Menyatukan Langkah Membangun Daerah

TILONGKABILA - GP- Sudah sejatinya menjadi komitmen untuk mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat. Hal ini menurut ketua DPRD Bonbol Faisal Yunus perlu dicapai lewat program pemerintah yang sudah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD).

Karena itu menurut Faisal itu harus diwujudkan dengan cara menyatukan langkah keseriusan bersama dalam mendukung langkah membangun daerah. Contoh caranya yakni dengan membentuk prinsip dan konsistensi yang diiringi semangat dan tekad dalam menopang segala program pembangunan yang diprioritaskan. Begitu juga dalam setiap mewujudkan gagasan program selalu memikirkan bagaimana bermuara pada kepentingan rakyat. Ketika itu bisa dijamin, maka selanjutnya pada saat merealisasikannya maka perlu diupayakan dengan sinergi antara lembaga penyelenggara pemerintahan. Membangun dan menjaga komunikasi sehingga tidak terjadi ketersinggungan baik dari kewenangan maupun tupoksi yang diemban.

“ Dan tentunya kita sama sama dukung bagaimana upaya untuk mewujudkan harapan dan kebutuhan publik yang dicita-citakan masyarakat, “ Supportnya belum lama ini. (csr)



JAJARAN aleg bercengkrama usai mengikuti paripurna belum lama ini.

Fungsi Kontrol Terus Ditunjukkan

TILONGKABILA - GP- Peran wakil rakyat dibutuhkan bila itu dipandang untuk segera mungkin mengupayakan melahirkan solusi penyelesaian. Upaya itulah yang selama ini ditunjukkan para elit politisi lewat pelaksanaan pengawasan intensif dan monitoring langsung pada setiap keluhan yang dihadapi masyarakat di tingkat bawah.

Menurut ketua komisi II Sofyan Wahidji bahwa pelaksanaan pengawasan itu menjadi bagian komitmen dan kinerja

wakil rakyat di parlemen Tilongkabila dalam rangka mengawal dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena itu komitmen itu pun dipastikan berlanjut dilakukan.

“Tujuannya semata-mata agar kami ikut andil mensukseskan kebijakan dari pemerintah daerah sehingga terlaksana dengan baik dan maksimal. kinerja ini tentunya akan terus ditonjolkan tak terkecuali satu pun bagi seluruh aleg, “ ujarnya belum lama ini.(csr)

Kerja Bersama Kunci Utama Menopang Keberhasilan

TILONGKABILA-GP- Hasil pastinya tidak akan pernah mengkhianati usaha. Slogan ini pantas menggambarkan semangat kinerja jajaran Sekretariat Dewan saat ini.

Terlebih dibawah kepemimpinannya, Sekwan Fredy Achmad yang selalu mengingatkan seluruh ASN dilingkungan kerjanya untuk bisa bekerja secara sungguh-sungguh. Sebab dengan serius menjalankan tugas dan tanggungjawabnya

maka apa yang menjadi target akan tercapai. Namun semua itu menurutnya akan sia-sia jika tidak dilakukan secara bersama. Sebab dengan bekerja bersama akan saling menopang dan menguatkan sehingga tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri. “ Maka itulah terus tingkatkan kinerja dengan saling bekerja bersama untuk mencapai target, “ serunya belum lama ini. (csr)

SOAL KEKUASAAN BUKAN SELAMANYA

Reaksi Gerindra Merespons Pernyataan AHY

PENGUMUMAN (TENTANG SERTIPIKAT HILANG) NOMOR : 16/DI304-30.05/IX/2026					
Untuk mendapatkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat hilang berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan ini diumumkan bahwa :					
No	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Alamat Pemegang Hak	Tanggal Pembukuan	Keterangan
1.	30.05.11.07.1.00128	SYAFRUDIN BAMI CAMARU	KP. BARU	25/06/2020	
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa berkeberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut diatas maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku syah menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.					
Nomor Berkas : 5542/2026 Nama Pemohon : NURHAYATI NOHO SULEMAN DI 301 : 1206/2026					

JAKARTA - Juru bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menyebut partainya menghormati setiap pandangan politik yang disampaikan pihak lain di dalam maupun luar pemerintahan era Prabowo Subianto. Hal demikian dikatakan Bahtra menyikapi pernyataan Ketua Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bilang kekuasaan bukan bersifat selamanya. “Tentu kami menghargai, menghormati setiap pendapat partai, baik itu partai yang di luar koalisi, begitu pun partai yang ada di apa namanya, pemerintahan,” kata dia di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).

Namun, Bahtra menilai fokus utama

Gerindra bukan untuk berspekulasi soal wacana politik masa depan, melainkan mengawal jalannya pemerintahan dan janji kampanye Prabowo. “Kami dari Partai Gerindra betul-betul konsentrasi untuk bagaimana program-program prioritas Presiden Prabowo bisa dirasakan kemanafaatannya oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” ujar dia. Bahtra kemudian menerima pertanyaan soal anggapan pernyataan AHY sebagai sinyal atau ancang-ancang Menko Infra itu akan maju pada Pilpres 2029.

“Ya, tentu setiap partai punya kebebasan, kemerdekaan masing-masing,” ujarnya. Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan

Gerindra tidak memiliki kapasitas untuk melarang atau menghalangi ambisi politik pihak mana pun. “Kami juga dari Gerindra tidak bisa melarang, ya, setiap partai kemudian kalau ada keinginan atau ada kemauan untuk kemudian mencalonkan diri,” ujarnya.

Dia menuturkan penyelenggaraan pemilu berikutnya masih relatif jauh dan berbagai tantangan global hingga bencana alam lebih membutuhkan kerja nyata dari pemerintah. “Kami lihat misalnya ada bencana di mana-mana dan ini kita harus solid bekerja sama untuk terus bagaimana berbuat yang terbaik dalam situasi yang seperti ini,” ujar Bahtra. (jpnn)



Gedung Nasional bakal Jadi Museum 23 Januari

SILPA Jadi Andalan Tutup Kebutuhan Anggaran

GORONTALO - GP - Pemerintah Kota Gorontalo mengusulkan penambahan belanja daerah hingga Rp63,53 miliar dalam rancangan perubahan APBD 2026. Kenaikan belanja tersebut tidak diikuti penambahan target pendapatan daerah yang tetap berada di angka Rp1,035 triliun.

Rancangan perubahan anggaran itu disampaikan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dalam rapat paripurna DPRD Kota Gorontalo dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2026, Senin (7/9/2026).

Dalam APBD induk 2026, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1.004.872.598.961. Melalui perubahan APBD, Pemkot Gorontalo mengusulkan angka tersebut naik menjadi Rp1.068.405.576.925.

Di sisi lain, target pendapatan tidak bergerak. Pemkot tetap mematok pendapatan daerah sebesar Rp1.035.224.637.005, yang terdiri dari PAD Rp447,15 miliar dan pendapatan transfer Rp588,07 miliar.

Adhan menjelaskan, perubahan APBD dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan anggaran hingga semester pertama 2026. Sejumlah asumsi yang digunakan ketika menyusun APBD induk dinilai sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi aktual.

Selain menyesuaikan asumsi anggaran, perubahan tersebut diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan program prioritas dan layanan publik yang dinilai mendesak.

“Perubahan anggaran ini dilakukan karena beberapa asumsi yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya,” ujar Adhan dalam rapat paripurna.

Kenaikan belanja paling besar terjadi pada pos belanja operasi. Anggarannya bertambah dari Rp906,06 miliar menjadi Rp961,32 miliar.

Belanja modal juga meningkat, dari sekitar Rp97 miliar menjadi Rp104,66 miliar. Sementara belanja tidak terduga naik dari Rp1,2 miliar menjadi Rp1,81 miliar.

Adapun belanja transfer tidak mengalami perubahan dan tetap dialokasikan sebesar Rp600 juta.

Untuk menutup kebutuhan pembiayaan akibat kenaikan belanja, Pemkot Gorontalo meningkatkan penerimaan pembiayaan secara signifikan. Jika dalam APBD induk penerimaan pembiayaan hanya dipatok Rp10 miliar, dalam rancangan perubahan anggaran nilainya diusulkan mencapai Rp73,53 miliar.

Sumber penerimaan tersebut sepenuhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya.

“Di tengah kenaikan belanja ini, kita mengandalkan komponen penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya,” kata Adhan.

Struktur anggaran tersebut membuat rancangan perubahan APBD 2026 mencatat defisit sebesar Rp33,18 miliar. Defisit itu kemudian ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.

Dengan skema tersebut, pemerintah daerah memproyeksikan tidak terdapat SILPA pada tahun anggaran berjalan.

Adhan mengatakan tambahan belanja dalam perubahan APBD akan difokuskan pada kebutuhan belanja wajib dan mengikat, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (adv)



Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea ketika memberikan sambutan pada rapat paripurna DPRD Kota Gorontalo dengan agenda rancangan KUPA serta PPAS perubahan APBD 2026, Senin (7/9/2026).



Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea ketika melakukan kunjungan ke Gedung Nasional, Senin (7/9/2026).

Adhan Minta Kinerja ASN Diperkuat

GORONTALO - GP - Persoalan disiplin aparaturnya kembali menjadi perhatian Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea. Saat memimpin apel awal pekan di Lapangan Taruna Remaja, Senin (7/9/2026), Adhan meminta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo menjaga kedisiplinan sekaligus meningkatkan kualitas kerja. Di hadapan jajaran aparaturnya, Adhan menyampaikan bahwa secara umum kedisiplinan pegawai mulai mengalami perkembangan positif. Namun, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah pelanggaran yang meski tergolong ringan, tetap perlu mendapat perhatian. Menurut Adhan, disiplin tidak sekadar berkaitan dengan kehadiran pegawai,

tetapi menjadi salah satu fondasi dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif. Untuk itu, pembinaan aparaturnya akan terus dilakukan. Setiap ASN diminta memahami posisi dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan sekaligus pelayanan masyarakat. “Disiplin harus menjadi bagian dari budaya kerja aparaturnya,” demikian penekanan Adhan dalam arahannya. Selain menyoroti disiplin, Adhan juga mengungkapkan bahwa Pemkot Gorontalo terus melakukan pembenahan internal organisasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengisian sejumlah jabatan yang masih kosong di beberapa perangkat

daerah. Pengisian jabatan tersebut dinilai penting untuk memastikan struktur organisasi pemerintahan dapat bekerja secara optimal. Dengan posisi strategis yang terisi, pelaksanaan program pemerintah diharapkan lebih terarah dan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal. Adhan pun meminta seluruh ASN tidak berhenti pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab melalui peningkatan kinerja. Ia berharap kedisiplinan, profesionalitas dan kualitas pelayanan terus diperkuat sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dapat dirasakan masyarakat. (adv)

Pemkot Perketat Pengawasan Bantuan Beras

GORONTALO - GP - Pemerintah Kota Gorontalo memperkuat pengawasan penyaluran beras bantuan pangan alokasi Juli-September 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus mengantisipasi tekanan inflasi di tengah musim kemarau dan potensi gangguan produksi pangan.

Monitoring penyaluran dipimpin Plt. Asisten Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, Abdulhafidz Daud. Pengawasan dilakukan mulai dari gudang Bulog hingga titik distribusi di tingkat kelurahan.

Hafidz mengatakan, penyaluran bantuan pangan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Selain memastikan beras sampai kepada penerima yang berhak, Pemkot Gorontalo juga melakukan penyaringan terhadap daftar penerima bantuan.

“Sesuai arahan Wali Kota Gorontalo, masyarakat yang terbukti menjadi pemabuk dan penjudi ditanggguhkan atau belum dapat menerima bantuan pangan ini,” tegas Hafidz.

Warga yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria



Pengawasan penyaluran bantuan beras yang dilaksanakan Pemkot Gorontalo.

tersebut nantinya dapat digantikan oleh masyarakat lain dengan tingkat kesejahteraan yang sama, yakni kelompok desil 1 hingga desil 4 yang masuk dalam daftar penerima cadangan.

Untuk memastikan data penerima sesuai kondisi di lapangan, Bulog akan menyerahkan daftar penerima kepada pemerintah kelurahan. Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi kembali sebelum bantuan disalurkan.

Pengawasan juga tidak berhenti di gudang Bulog. Tim monitoring turun langsung ke sejumlah titik distribusi untuk memastikan proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan. Salah satu lokasi yang telah ditinjau adalah Kelurahan Wongkadiri Barat.

Hafidz menyebutkan,

berdasarkan pemantauan terakhir, realisasi penyaluran beras bantuan pangan di gudang Bulog telah mencapai 43 persen.

Pemkot menargetkan seluruh alokasi bantuan untuk periode Juli-September 2026 dapat tersalurkan 100 persen pada Rabu, 9 September 2026.

Pemkot Gorontalo berharap pengawasan berlapis tersebut mampu mencegah terjadinya kesalahan sasaran sekaligus menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di tengah ancaman musim kemarau dan potensi gagal panen, distribusi bantuan pangan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok di daerah. (adv)

Upaya Adhan Sejarah Gorontalo Dihidupkan Kembali

GORONTALO - GP - Gedung Nasional di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, bakal mendapat wajah baru. Pemerintah Kota Gorontalo berencana mengalihfungsikan gedung tersebut menjadi Museum 23 Januari, yang diproyeksikan sebagai pusat edukasi sejarah perjuangan Gorontalo.

Rencana itu diungkapkan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, saat meninjau langsung Gedung Nasional, Senin (7/9/2026) pagi. Dalam kunjungan tersebut, Adhan didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Adhan mengatakan, museum tersebut nantinya tidak sekadar menjadi tempat menyimpan benda-benda bersejarah. Lebih dari itu, Museum 23 Januari diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal perjalanan sejarah daerah.

“Kita akan membuat Gedung Nasional berubah menjadi museum. Kita akan namai Museum 23 Januari,” ujar Adhan.

Sebagai langkah awal, Adhan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo segera mempersiapkan seluruh kebutuhan administrasi yang diperlukan.

Dinas tersebut juga diminta mulai menghimpun berbagai data dan informasi sejarah Gorontalo yang nantinya menjadi bagian penting dalam pengelolaan museum.

“Kepengurusannya kita akan serahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti Pak Kadis tolong dipersiapkan segala bentuk administrasinya,” katanya.

Menurut Adhan, kelengkapan data sejarah menjadi fondasi utama sebelum Museum 23 Januari benar-benar difungsikan. Berbagai informasi terkait perjalanan sejarah Gorontalo akan dikumpulkan untuk memperkuat materi yang akan ditampilkan di dalam museum.

“Kita juga akan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengumpulkan data-data untuk melanjutkan fungsi Gedung Nasional menjadi Museum 23 Januari,” ujarnya.

Tak ingin museum hanya menjadi ruang pamer, Adhan juga menyiapkan konsep pemanfaatan museum sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran bagi pelajar.

Ia berencana mendorong kunjungan siswa dari berbagai sekolah secara rutin. Dengan demikian, museum dapat menjadi ruang belajar alternatif yang memungkinkan pelajar mengenal sejarah Gorontalo secara langsung.

“Nantinya setelah museum dibentuk, kita akan susun agar bagaimana secara rutin siswa-siswi di tiap-tiap sekolah yang ada di Gorontalo dapat melakukan kunjungan ke museum untuk belajar tentang sejarah Gorontalo,” kata Adhan.

Adhan menilai pengenalan sejarah daerah kepada generasi muda menjadi hal penting. Menurutnya, perkembangan zaman tidak boleh membuat anak-anak Gorontalo kehilangan pengetahuan mengenai akar sejarah daerahnya sendiri.

“Biar anak-anak kita tidak melupakan sejarah daerah mereka sendiri,” tegasnya.

Namun, rencana alih fungsi tersebut belum serta-merta mengubah aktivitas di Gedung Nasional.

Saat ini, bangunan tersebut masih digunakan untuk aktivitas petugas pemadam kebakaran.

Maka dari itu, sebelum Museum 23 Januari direalisasikan, Pemkot Gorontalo masih perlu menyiapkan berbagai aspek, mulai dari administrasi, pengumpulan dan validasi data sejarah hingga pengaturan pemanfaatan gedung.

Jika terealisasi, Museum 23 Januari diharapkan menjadi salah satu ruang publik yang memperkuat literasi sejarah sekaligus memperkenalkan perjalanan perjuangan Gorontalo kepada generasi berikutnya. (adv)

POSISI KAS DAERAH PER 07 SEPTEMBER 2026

I	Posisi Saldo Kas BUD per 06 September 2026	88.381.147.383,01
	Penerimaan Kas Daerah per 07 September 2026	439.375.536,00
	Pengeluaran Kas Daerah per 07 September 2026	485.216.663,00
II	Saldo Akhir per 07 September 2026	88.335.306.256,01

Gorontalo, 08 September 2026
PIL. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA GORONTALO

Ttd

MARWAN MURSIDI, S.Sos, MH

